PENETAPAN ABDURRAHMAN WAHID SEBAGAI PRESIDEN DI LIHAT DARI PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYAH*

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

LAFITRI FADILAH
NIM. 1321043

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penetapan Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden di Lihat Dari Perspektif *Siyasah Syar'iyah*", yang ditulis oleh Lafitri Fadhilah, NIM 1321043, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penetapan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden Indonesia tahun 1999 terjadi pada masa transisi partai politik pasca-Orde Baru. Dalam perpektif *siyasah syar'iyah*, seorang pemimpin idealnya harus memiliki keadilan, kapasitas intelektual, legitimasi rakyat dan kesehatan fisik. Meskipun memiliki keterbatasan penglihatan, Gus Dur tetap diangkat sebagai presiden serta didukung oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan dan persyaratan kepala negara menurut *siyasah syar'iyah* dan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif mengenai penetapan Abdurrahman Wahid sebagai presiden di lihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*.

Metode penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dalam tulisan ini peneliti menggunakan studi pustaka atau menggali data dari *library research*. Data utama yang digunakan adalah literatur-literatur yang dapat dikelompokkan kepada bahan kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab klasik, seperti *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi serta sumber-sumber sejarah kontemporer Indonesia.

Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, 1) penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 dilakukan melalui mekanisme konstitusional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang umum MPR tahun 1999, 2) mekanisme penetapan kepala negara menurut *siyasah syar'iyah* dapat ditempuh melalui 5 cara yaitu, a) bai'at oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, b) penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, c) persetujuan umat, d) pengambil alihan kekuasaan yang berujung pada stabilitas dan keadilan (*al-taghallub*), dan e) pemilihan umum sebagai bentuk syura modern. Gus Dur tetap diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia meskipun dalam kondisi mengalami cacat fisik (gangguan penglihatan), hal ini dikarenakan beberapa faktor politik, intelektual, legitimasi moral, dan dukungan koalisi partai politik saat itu.

Kata Kunci : Abdurrahman Wahid, *Siyasah Syar'iyah*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

K. H. Abdurahman Wahid terpilih menjadi presiden RI (Republik Indonesia) keempat setelah menang intens Pemilu atas 20 Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (*voting*) akan tertutup dan rahasia, atas 691 anggota MPR akan mengikuti suara intens pemilihan presiden tersebut. K. H. Abdurahman Wahid memperoleh 373 suara sedpoinn megawati memperoleh 313 suara. K. H. Abdurahman Wahid akan menang intens voting tersebut akhirnya menjadi presiden, sedpoinn Megawati menjadi wakil presiden.[1] Atas demikian, MPR akhirnya menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI periode 1999-2004 menggantikan B.J Habibi.[2]

Abdurrahman Wahid atau akan sering disapa Gus Dur, terpilih menjadi Presiden keempat, berkat dukungan atas partai-partai Islam akan tergabung intens Poros Tengah yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan, dan Fraksi Partai Bulan Bintang. Poros Tengah dibentuk buat memunculkan calon presiden ketiga (alternatif) akan diharapkan dapat bersaing atas dua calon presiden akan lebih dahulu dicalonkan oleh partai pengusungnya yaitu Megawati Soekarnoputri (PDI-P) dan B.J. Habibie (Golkar). Pencalonan

[1] Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di era reformasi,* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 95.

[2] Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 245.

Abdurrahman Wahid ini dikatakan yakni cara buat menjaga keseimbangan kekuasaan selah kelompok Megawati dan kubu Habibie.[3]

Atas 20 Oktober 1999, sesaat sebelum Sidang Umum MPR digelar, Habibie mengumumkan keputusannya buat mundur atas arena pencalonan setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR.[4] Semenjak saat itu, Partai Golkar kemudian menyatakan dukungan keatas Gus Dur. Praktis pemilihan presiden intens Sidang Umum MPR hanya diikuti Megawati dan Abdurrahman Wahid. Atas Sidang Umum MPR 1999 tersebut Abdurrahman Wahid berhasil terpilih sebagai presiden atas perolehan suara lebih unggul atas Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, pemerintahan B. J. Habibie hanya bertahan selama 1 tahun 5 bulan (21 Mei 1998-20 Oktober 1999) dan disebut sebagai presiden atas masa jabatan tersingkat.

Duet Abdurahman Wahid sebagai Presiden, dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden langsung disambut sangat meriah, dan antusias oleh seluruh rakyat Indonesia. Tampilnya pimpinan nasional akan baru sebagai kemenangan kelompok demokrasi atas rival terberatnya akan seringkali disebut kelompok statusquo diharapkan mampu menegakkan demokrasi, menyelesaikan krisis ekonomi, dan menegakkan hukum serta keamanan nasional.

Terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden intens sidang umum MPR 1999 memberi harapan akan

[3] Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 361.

[4] https://nasional.kompas.com/dramapanjangusdur, diakses 20 Mei 2025

besar buat bangsa Indonesia. Harapan besar itu atas umumnya bersumber atas keinginan kolektif agar kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional segera pulih kembali setelah selama lebih atas 2 tahun bangsa Indonesia terpuruk dilanda krisis ekonomi dan politik akan begitu dahsyat. Ada sejumlah aspek mengapa harapan masyarakat sangat besar terhadap duet kepemimpinan Gus Dur-Mega. Pertama, kecuali Soekarno-Hatta akan dipilih secara aklamasi oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), buat pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia merdeka, presiden dan wapres dipilih secara demokratis oleh para anggota MPR hasil pemilu 1999 akan relatif damai dan demokratis pula. Kedua, K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati yakni kombinasi atas dua golongan bangsa akan terpenting yaitu islam disatu pihak dan golongan nasional lainnya.[5]

Disisi lain banyak akan tidak menakanka bahwa Gus Dur terpilih menjadi presiden. Banyak pihak menakanka pertarungan akan dimenpoinn oleh Megawati. Hal ini dikarenakan kondisi fisik Gus Dur kala itu sudah payah. Bahkan banyak pula akan menakansikan Gus Dur bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden secara normal. Ia mengalami cacat fisik berupa kebutaan atas mata kiri dan sebuatan atas mata kanan. Penglihatannya mulai memburuk karena glaukoma sejak tahun 1985, dan diperparah oleh sebuah kecelakaan di mana ia tertabrak mobil akan mengefekkan hilangnya retina.[6] Bahkan atas saat pelantikannya sebagai presiden, ia dibantu oleh seorang perwira Pointan Darat

[5] Riza Sihbudi et.al, *Bara Intens Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, (Bandung: Mizan 2001), 17.

[6] Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized*... 363

akan bertindak sebagai asisten atas membaca ulang teks sumpah presiden. Meskipun syarat menjadi pemimpin negara harus sehat fisik dan panca inderanya, Gus Dur menjadi pengecualian. Gus Dur tetap dipoint menjadi presiden meskipun kondisi fisiknya tidak sepenuhnya sehat. Ia yakni presiden indonesia pertama dan hingga saat ini satu-satunya akan memiliki cacat fisik.[7]

Islam sebagai agama akan komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya intens masalah individual namun juga masalah kenegaraan telah diatur oleh Islam, sebagaimana akan terdapat intens Q.S Annisa' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

> Artinya : *Wahai orang-orang akan beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di selah kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah keatas Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman keatas Allah dan hari kemudian. Akan demikian itu lebih utama (buatmu) dan lebih baik efeknya".* (QS. An-Nisa:59)

Kepala negara yakni sosok pemimpin tertinggi intens sebuah negara akan berdaulat, ia menjadi tempat buat rakyat buat mengadukan semua permasalahan akan mereka hadapi. Inilah salah satu atas fungsi pemimpin yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan keatas rakyatnya. Jika demikian,

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Gus_dur, diakses pada 24 Mei 2025

maka kehadiran seorang pemimpin apakah itu presiden, perdana menteri, ataupun raja yakni sangat penting intens kehidupan berbangsa dan bernegara.[8]

Intens *siyasah syar'iyah* hukum mengpoint pemimpin atau kepala negara yakni wajib, baik secara *syar'i* maupun *aqliy*. Persoalannya yakni bagaimana mekanisme pengpointan kepala negara. Para Ulama fikih telah banyak menulis tentang masalah politik dan ketatanegaraan, seperti: Pertama al-Mawardi intens Kitab *Aḥkam alSulṭaniyyah*, menjelaskan bahwa dua cara intens pengpointan pemimpin,[9] yaitu: Pertama, seorang kepala negara mungkin dipoint melalui lembaga pemilih (*ahl alhall wa al-'aqd*), kedua dipoint melalui penunjukan kepala negara akan sedang berkuasa. Kedua Yusuf al Qardhawi, intens Fiqh Daulah bahwa demokrasi sejalan atas ajaran Islam yaitu proses pemilihan akan melibatkan banyak orang buat mengpoint seorang pemimpin akan disukai, sesuai atas ajaran Islam akan menolak seorang imam salat akan tidak disukai oleh makmum.[10] Ketiga, Nasaruddin Umar, bahwa etika politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, prinsip intens mengpoint atau memilih pemimpin atas cara musyawarah.[11]

Berlandasan penjelasan di atas, penulis tertarik buat melakukan kajian akan lebih menintens melalui sebuah penelitian atas judul "Penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden di Lihat Atas Perspektif *Siyasah Syar'iyah*".

---

[8] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa AlWilayah Ad-Diniyyah,* terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), 1.

[9] Ibid, 12.

[10] Yusuf al-Qardhawi, *min fiqh ad-daulah fil islam, terj. Kathur Suhardi Fiqih Daulah intens Perspektif al Qur"an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 184.

[11] Nasaruddin Umar, Merto TV, Khazana Islam, 18 Maret 2018.

B. Rumusan Masalah

Berlandasan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah akan menjadi bahan kajian intens penelitian ini, pokok masalah tersebut yakni:

1. Bagaimana mekanisme penetapan dan persyaratan kepala negara buat *siyasah syar'iyah?*
2. Bagaimana mekanisme dan penetapan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dilihat atas perspektif *siyasah syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Buat mendeskripsikan mekanisme penetapan dan persyaratan kepala negara buat siyasah syar'iyah .
   b. Buat memperoleh gambaran akan jelas dan obyektif mengenai penetapan Abdurrahman Wahid sebagai presiden di lihat atas perspektif siyasah syar'iyah.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Buat menambah wawasan penulis tentang penetapan presiden di lihat atas perspektif siyasah syar'iyah.
   b. Sebagai sumber referensi buat peneliti selanjutnya atau pembaca apabila ingin melakukan kajian akan berkaitan atas penetapan Abdurrahman Wahid sebagai presiden berlandasan perspektif siyasah syar'iyah.
   c. Buat menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

d. Buat memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) atas Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Riset ini bertemakan mengenai penentuan Abdurrahman Satu selaku kepala negara di amati atas perspektif siyasah syar' iyah. Paling tidak ada sebuatan riset atas kerpoin posisi serta tujuan riset akan berlainan satu serupa lain. Atas peluang ini pengarang hendak melukiskan 4 di selah lain atas alibi kalau keempat riset ini nyaris mendekati atas riset akan hendak pengarang jalani.

Riset awal ditulis oleh Epran Aprianto, akan bertajuk" Kedudukan Abdurrahman Satu intens Politik di Indonesia(1999- 20001)", mahasiswa Fakultas Akhlak serta Humaiora UIN Raden Fatah Palembang. Rezim K. H. Abdurrahman Satu bertahan 22 bulan, banyak kebijaksanaan kebijaksanaan Kepala negara akan hadapi delegitimasi politik serta sosial akan menyebabkan K. H. Abdurrahman Satu geser atas jabatannya. Gagasan sosial politik akan diperjupoinn didunia politik Indonesia. Awal, intens perihal Pendemokrasian di Indonesia, Abdurahman Satu memperjuangan independensi orang, independensi hukum, pluralism serta humanisme. Kedua, pluralisme intens melindungi dinamisasi keimanan. Ketiga, patriotisme, Abdurahman Satu mengupayakan serta menjaga NKRI atas bersumber atas Pancasila serta UUD 1945.

Relevansi riset ini atas pengarang terdapat atas pertemuan serta perbedaannya. Persamaannya terdapat atas tipe penelitiannya bersama memakai pendekatan kualitatif atas tata cara riset daftar pustaka(library research) serta bersama mangulas Abdurrahman Satu akan sempat berprofesi selaku kepala negara Indonesia. Perbedaannya terdapat atas jpoinuan pembahasannya, dimana intens riset ini mangulas gimana kedudukan Abdurrahman Satu intens politik Indonesia. Hasil penelitiannya bisa diamati atas sebuatan perihal akan diperjupoinn oleh Abdurrahman Satu semacam pendemokrasian, pluralisme serta patriotisme. Sedpoinn itu, pengarang mangulas hal penaikan Abdurrahman Satu selaku kepala negara ditinjau atas perspektif siyasah syar' iyah. Intens perihal ini dianalisis cara penentuan Abdurrahman Satu selaku kepala negara apakah relatif cocok atas prinsip-prinsip siyasah syar' iyah.

Kedua yakni riset Ahmad Nurhuda serta Yera Zettira Agesti, atas kepala karangan" Era Rezim Abdurrahman Satu(1999- 2001)", mahasiswa UIN Pemimpin Bonjol Atasng. Riset ini memakai tata cara riset daftar pustaka(library research). Hasil riset membuktikan kalau, atas jatuhnya pemerintahan Soeharto akan dimotori mahasiswa ataupun aksi pembaruan atas tahun 1998, Indonesia sudah hadapi pergantian akan sedemikian itu kilat. Salah satu tahap pembaruan yakni kala kepemimpinan nasional dipegang oleh K. H. Abdurrahman Satu serta atas era ini sudah banyak pergantian pokok atas tingkatan andil tentara, bagus intens kancah sosial ataupun politik. Beliau memposisikan tentara atas cara handal selaku daya pertahanan serta keamanan

nasional. K. H. Abdurrahman Satu yakni orang akan tidak berubah- ubah atas prinsip- prinsipnya serta prinsip- prinsip itu bersumber atas pemahamannya keatas Islam bebas, ialah pemahamannya akan menekankan atas belas kasihan, pemaafan, kasih cinta Tuhan serta keharusan kita buat menjajaki sifat- sifat ini intens kehidupan tiap hari, paling utama intens kehidupan berkeyakinan. Pergantian akan dicoba K. H. Abdurrahman Satu lain menakankut penghapusan Unit Sosial serta Unit Pencerahan. Penghapusan kedua unit jadi polemik sebab atas era pemeritahan Soeharto Unit Pencerahan jadi corong penguasa serta Unit Sosial jadi unit akan mengurus permasalahan sosial. Abdurrahman Satu senantiasa menghilpoinn 2 unit ini, meski setelah itu atas era rezim selanjutnya dihidupkan balik.

Pertemuan riset ini atas riset pengarang ialah bersama memakai pendekatan kualitatif atas tata cara riset daftar pustaka(library research) serta mangulas figur akan serupa ialah Abdurrahman Satu. Perbedaannya terdapat atas jpoinuan pembahasannya, dimana intens riset ini mangulas perubahan-perubahan akan terjalin atas era rezim Abdurrahman Satu, mulai atas andil tentara, bagus intens kancah sosial ataupun politik. Sebaliknya riset pengarang mementingkan atas penaikan Abdurrahman Satu selaku kepala negara Indonesia akan ditinjau atas perspektif siyasah syar' iyah.

Ketiga yakni riset Athoilah Islamy, akan bertajuk" Alas Filosofis serta Corak Pendekatan Abdurrahman Satu mengenai Aplikasi Hukum Islam di Indonesia", mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Riset ini ialah riset kualitatif akan berbentuk amatan pustaka. Riset ini masuk jenis riset hukum

Islam normatif filosofis. Filosofi akan dipakai selaku filosofi analisa, ialah filosofi paradigma formalisasi hukum Islam. Ada 2 kesimpulan besar intens riset ini. Awal, pribumisasi Islam ialah alas filosofis Abdurrahman Satu atas bentuk aplikasi hukum Islam lewat tata cara pemahaman kontekstual serta kontekstualisasi hukum Islam klasik. Kedua, corak pendekatan Abdurrahman Satu terpaut aplikasi hukum Islam intens kondisi Indonesia ialah pendekatan kata benda kultural.

Pertemuan riset ini atas riset pengarang ialah bersama memakai pendekatan kualitatif akan berbentuk amatan pustaka serta bersama mangulas hal Abdurrahman Satu. Perbedaannya terdapat atas lingkup akan diulas, dimana intens riset ini menganalisa hal pendekatan Abdurrahman Satu terpaut aplikasi hukum Islam di Indonesia. Filosofi akan dipakai selaku filosofi analisa, ialah filosofi paradigma formalisasi hukum Islam. Sedpoinn pengarang mangulas penaikan Abdurrahman Satu selaku kepala negara ditinjau atas perspektif siyasah syar' iyah ataupun politik hukum islam. Filosofi ini dipakai buat menganalisa kebijaksanaan penguasa intens kaitannya atas prinsip- prinsip hukum islam atas tujuan melindungi faedah pemeluk orang.

Keempat yakni riset Blaster Santalia, akan bertajuk" K. H. Abdurrahman Satu: Agama serta Negeri, Pluralisme, Pendemokrasian serta Pribumisasi", Dosen senantiasa Fakultas Ushuluddin, Metafisika serta Politik. Buat K. H. Abdurrahman Satu ikatan selah Islam serta negeri, tidak terdapat antagonisme, negeri tidak musti diformalkan atas merek Islam. Ini didasarkan atas terdapatnya agunan buat berjalan berarak intens suatu negeri kesatuan akan

berideologikan pancasila, namun di buatan lain membuatkan independensi buat melaksanakan agama serta keyakinan di dasar jaminan negeri serta konstitusi. Sebaliknya pluralisme buatnya yakni salah satu kemampuan buat membuat kerakyatan akan membuatkan peluan atas seluruh macam buat berkompetisi di intens memperoleh hak akan serupa di depan hukum, alhasil tidak terdapat masyarakat merasa di no duakan. sebaliknya gagasanya mengenai pribumisasinya yakni bukan berarti melenyapkan poin poin Islami intens warga, namun gimana poin- poin itu searah atas kebudayaan lokal. Serta akan terutama yakni subtansinya bukan lebelitasnya(simbolik).

Pertemuan riset ini atas riset pengarang ialah bersama memakai pendekatan kualitatif akan berbentuk amatan pustaka serta bersama mangulas figur Abdurrahman Satu. Perbedaannya terdapat atas lingkup akan diulas, dimana intens riset ini mangulas mengenai pandangan Abdurrahman Satu terpaut agama serta negeri, pluralisme, pendemokrasian serta pribumisasi. Sebaliknya pengarang berupaya mendefinisikan metode penentuan serta persyaratan kepala negeri buat siyasah syar' iyah serta penentuan Abdurrahman Satu selaku kepala negara di amati atas perspektif siyasah syar' iyah.

E. Penjelasan Judul

Ada pula uraian atas perkata akan ada intens kepala karangan ini buat menjauhi multi pemahaman, ialah:

Kepala negara atau Kepala Negeri: Kepala negeri yakni kedudukan perseorangan akan memiliki andil selaku delegasi paling tinggi atas sesuatu negeri, kepala negara

memiliki hak serta tanggung jawab politik akan cocok kontitusi suatu negeri, oleh karena itu artikulasi kepala negeri lewat konstitusi berlainan atas negeri lain di bumi, negeri atas sistem presidensial memiliki 2 peran ialah selaku kepala negeri serta pula selaku kepala rezim.

Abdurrahman Satu: Abdurrahman Satu dilahirkan atas julukan Abdurrahman ad- Dakhil lebih diketahui atas julukan Gus Dur yakni politikus Indonesia serta Atasan Agama Islam, akan berprofesi selaku kepala negara Indonesia keempat semenjak tahun 1999 sampai 2001. Tidak hanya selaku atasan badan Nahdlatul Malim, beliau pula ialah penggagas Partai Kebangkitan Bangsa(PKB).

Rancangan kepemimpinannya akan istimewa atas bermacam kebijaksanaan akan kontroversial, salah satu kebijaksanaannya sangat populer yakni melepaskan pembedaan adat atas kehadiran etnik Tionghoa di Indonesia.

Siyasah Syar' iyah: Atas cara etimologi(lughah atau literal), siyasah berawal atas tutur" sasa- yasusu- siyasatan" akan berarti mengurus, mengatur, menata ataupun membuat ketetapan mengenai kebutuhan seorang ataupun pemeluk. Atas cara terminologi siyasah(politik) dimaksud selaku pengurusan faedah pemeluk orang cocok atas syara' serta menakankal kemudharatan ataupun lebih diketahui atas sebutan siyasah syar' iyah. Siyasah syar' iyah ialah usaha pengurusan permasalahan permasalahan biasa oleh penguasa buat menjamin terciptanya faedah serta terhindarnya kemudharatan atas tidak berlawanan atas determinasi syariat Islam serta prinsip- prinsip biasanya.

Jadi, arti atas kepala karangan skripsi ini atas cara totalitas yakni mengenali gimana metode penentuan serta persyaratan kepala negeri buat siyasah syar' iyah serta metode penentuan Abdurrahman Satu selaku kepala negara diamati atas perspektif siyasah syar' iyah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Riset akan hendak pengarang jalani ini ialah riset daftar pustaka(library research) atas informasi penting akan dipakai yakni literatur-literatur akan bisa dikelompokkan atas materi daftar pustaka. Riset ini memakai pendekatan kualitatif, ialah riset akan analisa informasinya lebih merujuk atas pendeskripsian data- data akan diperoleh lewat kesusastraan daftar pustaka serta dituliskan intens wujud perkata ataupun kalimat-kalimat lisan serta bukan intens wujud poin- poin.

2. Ppoinl Data

Terdapat 2 tipe ppoinl informasi akan pengarang maanfaatkan intens riset ini, ialah ppoinl informasi pokok serta ppoinl informasi inferior.

a. Informasi Primer

Ppoinl informasi pokok ialah data- data penting akan didapat atas kesusastraan penting cocok atas tema riset ini. Ada pula ppoinl pokok akan pengarang maanfaatkan di mari yakni novel karangan Abdurrahman Satu" Pergulatan negeri agama serta kultur".

b. Informasi Sekunder

Ppoinl inferior ialah literatur- literatur cagak ataupun bonus buat menguatkan serta menolong menganalisa data- data akan diperoleh atas ppoinl pokok di atas. Ppoinl inferior akan pengarang maanfaatkan selah lain buatan Greg Barton“ the authorized biography of Abdurraman Satu”, novel alih bahasa buatan Pemimpin Al Mawardi“ Al Ahkam As Sulthaniyyah” serta literatur- literatur lain akan mensupport keatas ulasan pengarang. Misalnya materi- materi akan berawal atas harian, skripsi, disertasi, karangan, majalah, surat kabar, serta lain sebagainya

3. Tata cara Pengumpulan Data

Bersumber atas ppoinl informasi akan pengarang kemukakan lebih dahulu hingga tata cara pengumpulan informasi akan pengarang maanfaatkan yakni atas membaca literatur- literatur penting serta pula kesusastraan bonus akan berkaitan atas kasus riset. Hasil pustaka itu berikutnya dituliskan intens catatan- catatan kecil atas suatu novel akan dikhususkan buat menulis. Kegiatan berikutnya yakni membuat data- data itu atas buatan- buatan cocok atas sub- sub ulasan akan telah disistematiskan intens riset ini. Setelah itu pengarang menata data- data itu ke intens suatu catatan ataupun informasi riset.

4. Analisa Data

Data- data akan sudah digabungkan hendak disusun intens suatu catatan atas memakai analisa kualitatif intens wujud deskritif. Analisa deskriptif akan diartikan yakni menarpoinn balik tiap informasi akan ditemui supaya memperoleh cerminan akan lebih nyata. Di

sisi itu analisa informasi pula memakai filosofi deduktif serta induktif. Tata cara deduktif ialah filosofi pengumpulan kesimpulan bersumber atas determinasi akan biasa. Sebaliknya tata cara induktif ialah teori

pengumpulan kesimpulan akan berasal atas peristiwa- peristiwa ataupun data- data akan spesial serta buat berikutnya didapat kesimpulan akan bertabiat biasa. Tidak hanya memakai tata cara deskriptif, deduktif, serta induktif, intens sebuatan kondisi khusus pengarang pula memakai tata cara komparatif, ialah menyamakan selah peristiwa- peristiwa ataupun data-data akan diperoleh.

5. Metode Penulisan

Metode penyusunan ini merujuk atas novel prinsip Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negara(UIN) Sjech Meter. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, serta intens keadaan khusus menjajaki anjuran serta bimbingan atas pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Buat lebih mempermudah intens membaca serta menguasai isi atas skripsi ini atas cara totalitas, periset membuat penataan ataupun garis besar atas penyusunan ide akan dibuat jadi 5(5) ayat, atas sub- sub ayat akan tiap- tiap dijabarkan selaku selanjutnya:

Bab I: Kata pengantar. Bab ini terdiri atas kerpoin balik permasalahan, kesimpulan permasalahan, tujuan riset, uraian kepala karangan, kajian daftar pustaka serta riset terdahulu, tata cara riset, serta penataan penyusunan.

Bab II: Bab ini mangulas hal kepala negara Abdurrahman Satu, terdiri atas memoar Abdurrahman Satu, Abdurrahman Satu selaku seseorang pemikir serta cendikiawan, Abdurrahman Satu selaku penggerak politik serta kultur dan Penentuan Abdurrahman Satu selaku Kepala negara RI.

Bab III: Bab ini terdiri atas penafsiran siyasah syar' iyah, subjek serta lingkup siyasah syar' iyah, karakter penentuan hukum islam serta prinsip-prinsip siyasah syar' iyah.

Bab IV: Hasil Riset serta Ulasan. Bab ini terdiri atas informasi hasil riset bersama ulasan hal penentuan Abdurrahman Satu selaku kepala negara serta ditinjau atas perspektif siyasah syar' iyah.

Bab V: Penutup. Bab ini bermuatan kesimpulan atas ulasan serta saran

BAB II
PENETAPAN ABDURRAHMAN WAHID SEBAGAI PRESIDEN

A. Biografi Abdurrahman Wahid

1. Latar Belakang Keluarga

Abdurrahman Satu lahir atas 4 Agustus 1940 di Dusun Denanyar Jombang. Abdurrahman Satu yakni putra atas K. H. Satu Hasyim. Sedpoinn itu, ibunya akan bernama Sholichah yakni gadis penggagas Pondok Madrasah Denanyar, Jombang, K. H. Bisri Syansuri. Abdurrahman Satu menikah atas Shinta Nuriyah akan setelah itu dikaruniai 4 orang gadis, ialah Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafshoh, Annita Hayatunnufus, serta Inayah Wulanatas.

Atas pihak eakan, Abdurrahman Satu yakni cucu atas penggagas serta pengasuh awal Pengasuh Besar Nahdlatul Malim(PBNU) ialah K. H. Hasyim Asy' ari akan sekalian penggagas Pondok Madrasah Tebuireng Jombang. Beliau yakni pula cucu atas K. H. Abdul Wahab Hasbullah, penggagas Pondok Madrasah Bahrul Ulum Tambakberas akan diketahui selaku malim akan ahli di aspek ushul fiqih. Sedpoinn itu atas rute bunda, aluran Abdurrahman Satu berjumpa atas K. H. Bisri Syansuri Penjaga Pondok Madrasah Denanyar Jombang. Atas begitu, intens dirinya mengalir 2 trah sekalian, ialah aristokrat(adiwangsa Jawa) serta elit agama(Islam).[1]

[1] Rohani Shidiq, *Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidik Pesantren Memperteguh Poin-poin Pesantren buat Transformasi dan Kosmopolitanisme Islam Nusselah* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 9-10.

2. Latar Pendidikan

Ekspedisi hidup Abdurrahman Satu diawali atas edukasi kedua orang tuanya. Salah seseorang sahabat bagus K. H. Satu Hasyim di Jakarta yakni seseorang masyarakat Jerman akan sudah masuk Islam, Willem Iskandar Bueller. Si papa kerap mengirim Abdurrahman Satu ke rumah Bueller sehabis berakhir sekolah. Atas dikala itu, beliau sekolah di Sekolah Bawah Matraman Perwari. Pergaulannya atas Bueller buatnya mencintai musik-musik klasik

Atas tahun 1954, Abdurrahman Satu(Gus Dur) menempuh tahapan SLTP, ialah Sekolah Menengah Ekonomi Awal(SMEP) serta bermukim di rumah Ajengan Junaid, seseorang Ajengan Muhammadiyah serta Badan Majlis Tarjih Muhammadiyah. Di sisi itu beliau pula berlatih di madrasah Krapyak Yogyakarta 3 kali intens sepekan. Setamat atas SMEP atas 1957, Gus Dur mulai menjajaki pelajaran di madrasah Krapyak atas cara penuh. 2 tahun selanjutnya, Gus Dur menuntut ilmu di Madrasah Tegalrejo sampai 1959 serta menghabiskan banyak waktunya atas membaca buku- buku Barat semacam Das Aset, metafisika Plato, Thales, Novel- novel Willem Bochner, serta Romantisme Revolusioner, serta karangan Lenin Vladimir Ilyeh

Sehabis sebuatan tahun di Madrasah Tegalrejo, Gus Dur sukses memahami ilmu- ilmu agama Islam. Gus Dur pula mempunyai keahlian bahasa asing akan baik, akan buatnya menguasai pandangan akademikus kategori bumi, semacam Karl Marx, Lenin, Gramsci, Mao Zedong, serta karya- karya pandangan Islam liberal. Sesudah“ nyantri” di Pondok

Madrasah Tegalrejo, Magelang, semenjak 1959 sampai 1963, Gus Dur meneruskan pengembaraannya mencari ilmu agama Islam di Pondok Madrasah Bahrul Ulum Bendungan beras, Jombang, Jawa Timur.

Atas tahun 1964 Gus Dur meneruskan pendidikannya ke Baghdad. Di Baghdad Gus Dur merasa puas sebab berpeluang berlatih metafisika, asal usul, kesusastraan Arab, serta bahasa Prancis. Apalagi, Gus Dur pula berpeluang berlatih adat- istiadat Ibrani dan menguasai komunitasnya. Di Baghdad pula Gus Dur bersahabat atas akademikus bebas serta inklusif bernama Anyaman atas komunitas Ibrani Irak. Keduanya sering membahas permasalahan ilmu agama serta membahas keberadaan agama Ibrani intens kehidupan diaspora selaku kalangan minoritas terzalimi di Irak.

Sehabis 4 tahun berlatih di Universitas Baghdad, Gus Dur menamatkan studinya ekuivalen S- 1. Ambisinya buat menuntut ilmu tidak sempat mati. Oleh sebab itu, beliau bernazar meneruskan pendidikannya ke Eropa. Saakannya, di Eropa Gus Dur memperoleh kekesalan sebab Universitas Leiden serta semua Universitas di Eropa tidak membenarkan badan pembelajaran di Universitas Baghdad. Atas dikala itu, akademi besar di Eropa memutuskan persyaratan buat alumnus Timur Tengah buat mengulang mulai atas tahapan S1. .[2]

[2] Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua (Yogyakarta: LKiS, 2002), 38-39.

Atas medio 1971 Gus Dur balik ke Tanah Air sehabis memandang serta mencermati kemajuan madrasah serta Islam serta ketertarikannya buat melangsungkan pembaruan keatas keduanya. .[3]

1. Karya- Karya Abdurrahman Wahid

Semenjak 1971 tulisan- tulisan Gus Dur sudah diketahui besar selaku representasi kalangan sarungan(Madrasah), sementara itu bila diperhatikan isi tulisannya, banyak akan memajukan analisa liberal. Gus Dur menawarkan pemikiran terkini buat menanggapi persoalan- persoalan akan lagi gaya dikala itu. Gus Dur mulai menulis semenjak jadi pengasuh Sekolah Mu' allimat pondok madrasah Bendungan Beras, Jombang. Mulai 1961, aktif mengirimkan artikelnya buat majalah Horison serta Adat Jawa. Tulisan- tulisannya terus menjadi bertambah kala Beliau terletak di Kairo. Atas 1964, bersama Musthofa Bishri Gus Dur menerbitkan majalah Perhimpunan Siswa Indonesia Kairo(PPI- Kairo).

Atas 1972, Gus Dur mulai membuatkan khotbah serta kolokium atas cara teratur di sela- sela aktivitasnya menulis buat majalah Tempo serta Kompas. Kolom- kolomnya menemukan sambutan amat bagus. Keseriusan menulisnya terus menjadi besar sehabis LP3ES menerbitkan Harian Prisma akan memajukan pandangan sosial akan kritis. Buat Gus Dur, menulis ataupun berkhotbah bukan hanya menaburkan gagasan fresh atas warga, melainkan pula berperan selaku perlawanan kultural keatas pemerintahan

[3] Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Ahmad Sulhi Chotib (eds), (Jakarta: Gramedia, 2005), 340.

akan berdaulat. Sampai tahun 2000, Incres mengumpulkan 493 tulisan Gus Dur akan terbuat intens berbagai bentuk, yakni:[4]

Bagan 2.1 Bentuk-Bentuk Tulisan Gus Dur

No	Bentuk Tulisan	Jumlah	Keterangan
1	Buku	12 buku	Terdapat pengulangan
2	Terjemahan	1	Bersama Wahid Hasyim
3	Kata pengantar buku	20	
4	Epilog buku	1	
5	Antologi	41	
6	Artikel	263	Tersebar di beberapa majalah dan koran
7	Kolom	105	Tersebar di berbagai majalah
8	Makalah	50	Sebuatan besar tidak dipublikasikan
Jumlah		493	

Sehabis tahun 2000, keluar 3 novel berkas catatan Gus Dur akan lain, ialah Berkas Kolom serta postingan Abdurrahman Satu Sepanjang Masa Geser(60 postingan), Gus Dur Berbicara(2 postingan), serta Universalisme serta Kosmopolitanisme Peradaban Islam(20 postingan akan dilansir di Kompas). Tidak hanya itu, publisitas catatan Gus Dur dicoba lewat web internet www. gusdur. net. Cakupan intelektualitas Gus Dur hadapi ekspansi atas durasi ke durasi, paling utama artikel akan dikembpoinnnya. Penemuan Incress(2000) mengenali kemajuan itu cocok atas periodesasi per 10 tahun, mulai 1970- 2000.[5]

Bagan 2.2 Tema-Tema Tulisan Gus Dur

No	Periode	Jumlah	Keterangan

[4] Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2010), 126-127

[5] Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur*..., 128.

1	1970-an	37	Tradisi pesantren, modernisasi pesantren, NU, HAM, reinterpretasi ajaran, pembangunan, demokrasi
2	1980-an	189	Dunia pesantren, NU, ideologi negara (Pancasila), pembangunan, militerisme, pengembangan masyarakat, pribumisasi Islam, HAM, modernisme, kontekstualisasi ajaran, Parpol.
3	1990-an	253	Pembaruan ajaran Islam, demokrasi, kepemimpinan umat, pembangunan, HAM, kebangsaan, Parpol, Gender, toleransi agama, Universalisme Islam, NU, Globalisasi.
4	2000-an	122	Budaya, NU dan Parpol, PKB, demokratisasi dan HAM, ekonomi dan keadilan sosial, ideologi dan negara, tragedi kemanusiaan, Islam dan fundamentalisme.

Sebaliknya buku- buku berkas catatan Gus Dur akan sudah diterbitkan yakni:

a. Bunga Rampai Madrasah(Dharma Abdi, 1979)

b. Mukmin di Tengah Pergumulan(Lappenas, 1981)

c. Ajengan Menggugat Gus Dur Menanggapi, Sesuatu Pergumulan Artikel serta Alih bentuk(Fatma Press, 1989)

d. Universalisme serta Kosmopolitanisme Peradaban Islam(Kompas, 1991)

e. Ajengan Eksentrik Membela Penguasa(LKiS, 1997)

f. Tabayun Gus Dur(LKiS, 1998)

gram. Islam, Negeri, serta Kerakyatan: Gabungan Recikan Perenungan Gus Dur(Erlangga, 1999)

h. Gus Dur Menanggapi Pergantian Era(Kompas, 1999)

i. Tuhan Tidak Butuh Dibela(LKiS, 1999)

j. Prisma Pandangan Gus Dur(LKiS, 1999)

k. Membuat Kerakyatan(Rosda Buatan, 1999)

l. Mengurai Ikatan Agama serta Negeri(Grasindo, 1999)

m. Melawan Lewat Candaan(Tempo, 2000)

n. Pergulatan Negeri, Agama, serta Kultur(Desselah, 2001)

o. Menggerakkan Adat- istiadat(LKiS, 2001)

p. Berkas Kolom serta Postingan Abdurrahman Satu Sepanjang Era Geser(LKiS, 2002)

q. Gus Dur Berbicara(Proaksi, 2005)

Islamku, Islam Kamu, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)

B. Abdurrahman Wahid sebagai Seorang Pemikir dan Budayawan

Abdurrahman Satu yakni salah satu figur intelektual serta pemikir Mukmin terkenal di Indonesia. Tidak hanya itu Abdurrahman Satu pula ialah seseorang cendikiawan kebesarhatian Nahdatul Malim(NU) serta warga Indonesia atas cara totalitas. Selaku seseorang pemikir kedatangan Abdurrahman Satu membuat para buruh kasar tinta senantiasa penasaran serta memohon opini keatas banyak orang akan mencacat serta kritis keatas gagasan-gagasan pandangan atas santri Jombang tersebut

Mayoritas orang jadi takut keatas Abdurrahman Satu sebab selaku seseorang kyai akan jadi panutan namun pemikiran- pemikiran akan dipunyai amat tidak umum buat warga Indonesia. Intens perihal ini banyak pemikirannya terasa asing ataupun berhadapan atas poin- poin kebanyakan

warga akan sedang konvensional ataupun belum terbiasa atas metode penglihatan bebas serta terbuka semacam Gus Dur. Wujud Abdurrahman Satu akan hebat, di buatan lain pula berarti serta realistis, alhasil membuat banyak orang menulis mengenai pemikiran- pemikiran akan dipunyai, walaupun tidak seluruh orang ingin menyambut gagasan- gagasan akan dikatakan oleh mantan kepala negara keempat Indonesia tersebut

Abdurrahman Satu yakni salah satu figur agama akan memiliki pandangan bebas di Indonesia. Gagasan pandangan akan memiliki karakteristik khas revolusioner membuat Abdurrahman Satu berlainan atas para pemikir Islam akan lain. Abdurrahman Satu jadi seseorang pemikir akan liberal serta bebas, bagus menakankut kasus agama, sosial, adat, ataupun politik. Pandangan akan liberal serta bebas itu diefeki oleh wawasan besar akan didapat atas pergumulan artikel akan dijalani semenjak anak muda.

Pandangan Abdurrahman Satu akan bebas, berimbang, serta longgar atas cara garis besar dibesarkan lewat tulisan- tulisan. Tulisan- tulisan itu bisa dipecah jadi 2 rentang waktu. Rentang waktu awal mencakup catatan Abdurrahman Satu selah tahun 1970 sampai akhir tahun 1980. Catatan Abdurrahman Satu atas rentang waktu itu banyak menerangi rumor kemajuan serta pembaruan madrasah. Rentang waktu kedua diawali atas tahun 1980- an hingga tahun 1990- an. Rentang waktu ini ialah era kala Abdurrahman Satu lebih menerangi isu- isu hal kerakyatan, pluralisme, hak asas orang, independensi berekspresi, serta pribumisasi Islam selaku atensi penting tulisan-tulisannya. Selaku seseorang intelektual, Abdurrahman Satu menupoinn

pemikiran- pemikiran lewat tulisan- tulisan intens bermacam wujud poin, sebuatan terdapat akan telah dijadikan novel serta beberapa akan lain jadi postingan objektif selaku buatan atas suatu novel tajuk karangan.

Sebuatan pandangan Abdurrahman Satu akan mempunyai efek besar ialah intens aspek pandangan keislaman, pluralisme, kerakyatan serta pribumisasi.

1. Ikatan Islam serta Negara

Ikatan Islam serta Negeri,

ialah sesuatu aspek amatan akan amat berarti selaku pertanda sosial. Ikatan itu ialah kaca agama Islam intens warga. Ikatan Islam serta Negeri intens uraian Gusdur dibilang kalau: Islam tidak memahami ajaran mengenai negeri. Intens pertanyaan wujud negeri, buatnya tidak memiliki ketentuan dasar. Perihal ini tergantung negeri berhubungan apakah ingin memakai bentuk kerakyatan, teokrasi ataupun monarchi. Perihal akan terutama buat Gusdur yakni terpenuhinya 3 kreteria, ialah: awal, memajukan prinsip- prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan kesamarataan. Ketiga, terdapatnya agunan independensi(al- huriyyah).

Intens awal UUD 1945 ada ajaran mengenai kesamarataan serta kelimpahan. Tidak terdapat pula ajaran kalau negeri wajib berupa formalisme negeri Islam, begitu pula intens penerapan keadaan kenegaraan. Negeri intens perspektif Gusdur yakni al- Hukum(hukum ataupun ketentuan).

Islam tidak memahami rancangan rezim akan defenitif alhasil etik kemasyarakatanlah akan dibutuhkan. Apa akan jadi kemauan Gusdur buat tidak

memformalkan Islam selaku pandangan hidup serta referensi intens negeri searah atas kemauan sebahagian besar masyarakat negeri akan kebanyakan Islam. Perihal ini tertes intens pemilu 1999 akan dimenpoinn oleh partai patriot tercantum PAN serta PKB

akan sedikit religius.

2. Pluralisme

Pluralisme yakni suatu mengerti akan membenarkan serta menyakini terdapatnya perbandingan intens warga akan mencakup perbandingan agama, suku bangsa, golongan, kaum adat, serta adat istiadat.

Intens membahas pluralisme, Gusdur tidak tidak sering menghubungkannya atas agama, sebab agama inilah akan kerap digunakan oleh kebanyakan intens menindas serta memencet atas cara bisik- bisik kalangan minoritas.

Pemikiran Gusdur keatas pluralisme terlihat atas perilakunya akan membela minoritas serta non mukmin serta melaksanakan kerjasama atas siapa saja atas cara terbuka, bagus atas golongan kristen, hindu, budha, ataupun golongan Islam akan lain.

Ilustrasi kala atasan tabloid Alat pemantau Arswendo Atmowiloto menaruh rasul Muhammad SAW atas antrean ke 11 di selah figur bumi. Pemeluk Islam atas cara otomatis bereaksi serta memohon supaya kantor tabloid di tutup serta dilarang bekerja, kemudian Gusdur berkata:" Aku tidak sepakat atas itu. Bawalah ke majelis hukum seperti itu penanganan akan

terbaik”. Gusdur membuatkan pelajaran atas orang buat menghormati daulat majelis hukum serta tidak berperan memeriksa sendiri.

Gusdur buat Frans Magnis Suseno yakni seseorang akan menintensi agama Islam atas cara amat terbuka. Beliau wujud individu akan leluasa atas seluruh kepicikan, primordialistik serta sektarian. Beliau nyata seratus persen seseorang akan berkeyakinan Islam namun keislamannya sedemikian itu afdal alhasil beliau merasa tidak rawan oleh pluralitas.

Tindakan pluralis Gusdur akan nampak lebih memprioritaskan golongan minoritas tidak tidak sering menemukan dakwaan serta hujatan akan berkali-kali, apalagi beliau dituduh sekuler serta penghianat pemeluk, sementara itu tindakan Gusdur akan begitu malah mau mengfungsionalisasikan anutan Islam atas cara maksimum. Agama tidak hanya ikon, serta menawarkan akad ke akhirat- an sedpoinn kenyataan kehidupan akan terdapat didiamkan tidak terharu. Tindakan Gusdur tidak sempat menampilkan kebenciannya atas kalangan minoritas menimbulkan pula dapat berteman siapa saja.

3. Demokratisasi

Jauh saat sebelum jadi kepala negara, Gusdur sudah melemparkan buah pikiran serta pemikirannya mengenai kerakyatan akan layak diaplikasikan di negara ini. Intens kondisi keindonesiaan, Gusdur memandang kerakyatan selaku sesuatu cara ataupun adat akan lalu menembus serta tidak cuma diukur atas bidang kelembagaannya saja semacam akan diaplikasikan sepanjang sistem terkini. Gusdur melaporkan kalau kerakyatan itu wajib utuh, tidak cuma

badan namun pula prilaku orang- orangnya pula wajib demokratis, tampaknya prilaku kita tidak demokratis.

Statment Gusdur di atas selaku wujud perlawanan keatas pemerintahan sistem terkini akan senantiasa mengklaim dirinya berlagak demokratis, sementara itu menghasilkan UU buat memerpoinp siapa saja akan mempersoalkan. Nyaris tidak terdapat orang akan berani mengemukakan bukti. Andaikan terdapat, akhirnya yakni korban, sebutlah misalnya Sri Bintang Penutup, AM. Ajaran apalagi angota DPR atau MPR sendiri sepanjang 32 tahun, kehadirannya cuma sepakat, setujuuu!. Melemppoinn kerakyatan buat Gusdur tidak dapat menjauhi ocehan akan tidak lezat apalagi polemik buatnya yakni akar kerakyatan.

Intens negeri akan demokratis, wajib pula diiringi oleh masyarakat warga akan demokratis. Warga demokratis buat Gusdur yakni seluruh masyarakat negeri memiliki perannya akan serupa di wajah hukum, independensi beranggapan dibuka seluas- luasnya, terdapatnya pembelahan akan jelas intens guna akan tidak bisa silih efeki selah administrator, legislatif serta yudikatif.

Intens melemppoinn kerakyatan Gusdur amat menjauhi terbentuknya kekerasan, serta dia lebih yakin atas peperangan kultural.

4. Pribumisasi

Sebutan" Pribumisasi Islam" awal kali dilemparkan tahun 1980- an oleh Abdurrahman Satu selaku ubah atas sebutan indigenization intens bahasa Inggris. Pribumisasi Islam lahir intens kondisi atensi Gusdur buat tidak menghasilkan Islam selaku pengganti keatas persoalan- persoalan kenegaraan

serta kebangsaan. Ini berlainan atas sebahagian komunitas aksi Islam pemurnian, para pelacak" Islam asli serta asli", di Indonesia menginginkan pengislaman negeri. Ataupun mengangkut anutan Islam selaku pengganti buat menanggulangi persoalan- persoalan kebangsaan. Semacam nampak intens desakan penguatan syariat Islam serta Piagam Jakarta.

Atas pribumisasi, seberinda anutan agama akan sudah diserap oleh kebudayaan lokal hendak senantiasa dipertahankan intens bingkai lokalitas itu. Singkatnya semacam dibilang Gusdur sendiri, mengokohkan balik ppoinl adat kita, atas senantiasa berupaya menghasilkan warga akan patuh berkeyakinan. Atas tingkat bahasa, beliau tidak sepakat atas pergantian beberapa kosakata intens bahasa Indonesia atas bahasa Arab, semacam balik tahun ditukar atas milad, aman pagi ditukar atas Assalamu Alaikum, sahabat ataupun kawan atas kawan cara ini diucap Islamisasi serta Arabisasi.

Hingga tidak bingung jika setelah itu timbul polemik diakhir 1980- an mengenai Assalamu Alaikum ditukar atas Aman Pagi.

Abdurrahman Satu bukan cuma diucap selaku figur pemikir, Gus Dur pula mempunyai partisipasi penting intens aspek kultur, semacam lewat pandangan serta aksi akan mendesak independensi beranggapan serta keterbukaan dampingi agama dan intens membuat adat politik akan lebih demokratis. Sinta Nuriyah Istri almarhumah Abdurrahman Satu, berkata sepanjang ini suaminya cuma diketahui orang selaku kepala negara serta

ajengan. Tetapi cuma sedikit akan memahami dia selaku seseorang cendikiawan. .[6]

Ekspedisi hidup Gus Dur memanglah sempat menulis kalau ia sempat berprofesi selaku pimpinan DKJ(Badan Keelokan Jakarta). Apalagi, buat salah satu kawan Gus Dur, Hairus Salim melaporkan kalau Gus Dur bercita- cita jadi seseorang pengarang roman akan tidak sempat terkabul ketika hidupnya.

Buatan cendikiawan Gus Dur tidak cuma terlihat atas perjalanannya di hal aktivisme khalayak. Buatan Gus Dur selaku seseorang cendikiawan pula timbul di kehidupan eksklusif selaku atasan keluarga.“ Sebab Gus Dur itu yakni cendikiawan, hingga aku melabeli cucu awal aku atas julukan Parikesit, akan mana yakni julukan satu figur atas pewaakanan”. Buat Sinta, ekspedisi Gus Dur selaku seseorang cendikiawan berawal atas pemahaman literasi akan besar. Ini Gus Dur miliki atas banyaknya pustaka akan ia belalah semenjak kecil. .[7]

Buat Gus Dur melestarikan kultur atas hakikatnya melindungi manusiawi. Lewat buah pikiran pribumisasi Islam, Gus Dur melestarikan aksi silaturahim buat menjaga adat- istiadat supaya tidak rawan segerombol orang akan mengatasnamakan agama. Sehabis 10 tahun sesudah meninggalnya Gus Dur, aksi penghancuran adat- istiadat serta adat lalu terjalin, semacam penghancuran arca serta pelarangan adat- istiadat seremoni adat atas julukan agama. Situasi itu membuat bangsa ini hadapi kekurangan adat- istiadat.

[6] Mahar Tri Pamungkas, dkk, “Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara”, *Jurnal Candi*, Vol. 14, No. 2, (2016), 20.

[7] Mahar Tri Pamungkas, dkk, “Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara”, *Jurnal Candi*, Vol. 14, No. 2, (2016), 20.

Sedpoinn itu, Inayah Wulanatas Satu gadis bontot Gusdur berkata, kiprah serta persembahan bapaknya intens perihal kultur dapat menginspirasi serta menanggapi tantangan perkara bangsa. Sampai saat ini pandangan Gus Dur sedang relevan. Tidak membingungkan jika buah pikiran serta rancangan kultur Gus Dur sudah jadi materi referensi berarti buat para pemikir serta pelakon adat. .[8]

Inayah pula berkata kalau komitmen membela kultur kalangan kecil membuat Gus Dur pantas diucap advokat adat. Gus Dur turut memberi warna serta memperkaya poin- poin manusiawi dan kebangsaan melalui kultur. Beliau mengatakan, buat Gus Dur, kultur menakankut perkara kebersamaan. Akan menarik, Inayah mengatakan kalau Gus Dur senantiasa menganjurkan buat mencermati lagu dangdut apabila mau menguasai suatu warga. Gus Dur menakanka, dangdut bukan cuma terpaut buatan seni, melainkan kenyataan kesedihan atas bermacam permasalahan akan dialami tiap hari..[9]

C. Abdurrahman Wahid Sebagai Aktivis Politik

Abdurahman Satu lumayan hebat atas zamannya serta lumayan kontroversial, bagus pandangan, aksi, ataupun perkataannya intens mendimanisir kehidupan agama, sosial, politik serta adat atas suku bangsa lokal, nasional, ataupun global. Abdurahman Satu kerap diucap Ice Breaker(Pemecah es) sebab kemampuannya membuat ruang dasar,

[8] Mahar Tri Pamungkas, dkk, "Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara", *Jurnal Candi*, Vol. 14, No. 2, (2016), 20.

[9] Zastrow, *Gus Dur, Siapa sih sampeyan*?, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1999), 1.

apalagi ruang keramat sekalipun, contoh air hening akan lagi mengalir intens satu sistem(kemapanan) sanggup di obok- oboknya. Abdurahman Satu pula kerap diucap figur akan kerap melaksanakan Counter Culture(anti kemapanan), tase case(percobaan permasalahan), ataupun mencoba kejadian atas tata cara Trial serta Error lewat lontaran- lontarannya selaku cara penataran buat bangsa akan beragam(Pluralis) ini.

Abdurrahman Satu mengawali aksi politik atas tahun 1984. Abdurahman Satu atas cara aklamasi oleh suatu regu ahlul pakar wal‘ aqdi, akan diketuai K. H. As‘ pointan darat(AD) Syamsul Arifin, buat mendiami kedudukan pimpinan biasa PBNU intens muktamar ke 27 NU di Pondok Madrasah, Salafiyah, Sukorejo Situbondo.

NU di dasar kepemimpinannya dapat lebih berpusat atas pembangunan sosial ekonomi- budaya. Namun ini hingga dijadikan strategi peralihan. Biarpun menarik diri atas politik resmi, NU malah menikmati efek tidak langsung politik akan penting serta tertes efisien selaku golongan penekan politik akan besar, Gus Dur senantiasa aktif intens politik serta membuat aliansi- aliansi sepanjang bertahun- tahun. Menjelang kemerosotan Kepala negara Soeharto, ia jadi komentator keatas ekses- ekses penguasa serta jadi pendukung Megawati, Gadis Kepala negara awal RI, Soekarno akan melantamkan penukaran Soeharto.

Sesudah Sistem Terkini, intens atmosfer independensi politik, Gus Dur membuat partai politik akan diberi julukan Partai Kebangkitan Bangsa(PKB). Pendirian PKB awal mulanya ialah media buat golongan

NU buat turut intens politik efisien. Meski intens determinasi awal mulanya, NU tidak ikut serta intens politik efisien, tetapi tidak menutup mungkin buat individu- individu di NU buat turun intens politik. Intens perihal inilah PKB jadi sarananya.

Gus Dur yakni salah seseorang intelektual Indonesia akan muncul serta amat terkenal atas bentuk kharismatiknya. Atas satu buatan Gus Dur ditatap selaku bentuk religius tetapi atas buatan lain ditafsirkan oleh banyak orang selaku intelektual bebas. Apalagi, luang pula menimbulkan timbulnya macam persoalan gimana wujud Gus Dur akan ialah intelektual bebas, pula bisa dikira selaku bentuk religius serta apalagi atasan karismatik ekuivalen orang tua. Hawa madrasah amat pekat intens aktifitasnya, perihal ini setelah itu pula membuat atmosfer apresiasi pemeluk keatasnya.

1. Gus Dur di Masa Sistem Baru

Ketika Sistem Terkini, Gus Dur banyak ikut serta aktivitas politik. Peran

politiknya dikala itu, lebih berkuasa atas golongan informal. Masuknya Gus Dur intens politik disebabkan kapasitas serta kuatnya massa pendukung dibelakangnya, intens perihal ini yakni golongan NU. Atas cara resmi, kedudukan politik akan sempat dipegang Gus Dur yakni badan MPR- RI rentang waktu 1989- 1993. Selebihnya yakni jabatan-jabatan akan terpaut atas kapasitasnya selaku malim. Tahun 1987- 1992, beliau sempat berprofesi selaku Pimpinan Badan Malim Indonesia(MUI).

Tahun 1984- 2000 beliau berprofesi selaku Pimpinan Badan Tanfidz PBNU.

Intens ranah politik, kendatipun beliau berawal atas golongan madrasah,

tetapi Gus Dur amat menjunjung besar prinsip kerakyatan. Rancangan inilah akan lalu dibesarkan serta diperjupoinnnya, akan terkadang

buatnya berhadapan atas tokoh- tokoh lain. Perjuangannya intens menciptakan rancangan kerakyatan buat kebutuhan bernegara, dibuktikan atas keterlibatannya intens pendirian LSM Forum Kerakyatan(1990).

Denah politik sistem terkini, terfokus atas 3 daya parpol ialah, Golkar, PDI, serta PPP. Pendulum politik sendiri sesungguhnya tergantung atas daya Kepala negara Soeharto(akan kala itu jadi Pimpinan Badan Pengajar Golkar). Bisa dibilang, PDI serta PPP tidak dapat berkutik intens mengalami daya Golkar.

Gus Dur, atas dikala ini telah turut berkecimpung. Terobosan-terobosan politik akan dicoba Gus Dur menampilkan kegiatan akan sering-kali susah diramalkan.

Gus Dur sempat dekat atas Megawati, akan dikala itu jadi pentolan atas PDI. Namun atas seketika, beliau menuntun Siti Hardiyanti Rukmana(Mbak Tutut), gadis Kepala negara Soeharto, akan kala itu lagi naik daun lewat program Parade Anak muda Nasional Indonesia. Atas dikala Tutut“ memudar” bersamaan atas tumbangnya Kepala negara Soeharto, Gus Dur

kilat menuntun balik Megawati menjelang pemilu 1997. Manuver-manuver itu dicoba atas lembut oleh Gus Dur. Aksi politik Gus Dur, Megawati, serta Tutut, sesungguhnya cuma buatan kecil atas kiprah Gus Dur akan senantiasa susah diprediksi.

Bermacam kegiatan politik Gus Dur ketika Sistem Terkini menampilkan kedudukannya akan vital. Beliau jadi salah satu figur akan memforsir terbentuknya pancaroba kewenangan atas Sistem Terkini ke pembaruan. Di buatan lain, beliau pula jadi salah satu pihak akan turut menopang daya pemerintahan Sistem Terkini. Tindakan bertolak balik serta polemik ini memanglah telah jadi karakteristik khas Gus Dur, akan bisa jadi hingga dikala ini, senantiasa susah di cerna.

2. Masa Reformasi

Sesudah mundurnya Soeharto selaku kepala negara, setelah itu dilanjutkan

oleh BJ Habibie akan lebih dahulu jadi delegasi kepala negara. Rezim BJ Habibie dikira banyak pihak cuma perpanjangan tangan atas Soeharto, oleh karenanya desakan ketidakpuasan keatas Habibie pula lalu timbul. Masa- masa ini pula menampilkan panasnya temperatur politik Indonesia. Unjuk rasa terjalin nyaris masing- masing hari, harga keinginan utama orang bertambah ekstrem, poin ubah rupiah keatas dollar AS belum teratasi, sementar perang pandangan di alat massa lalu terjalin.

Atas era inilah, Gus Dur memainkan kedudukan politiknya akan kian kokoh. Tindakan polemik serta susah diduga senantiasa timbul. Di tengah

kegentingan politik, beliau malah mengemukakan buah pikiran buat melangsungkan perbincangan bidang 4 atas Soeharto, Kepala negara Habibie serta Pangab Jenderal Tentara Nasional Indonesia(TNI) Wiranto. Gagasannya ini malah menimbulkan kebingungan bermacam pihak, kalau ini hendak jadi kompromi- kompromi politik, sementara itu orang dikala itu amat beruntun mengajukan desakan majelis hukum keatas Soeharto serta mundurnya Habibie. Gus Dur sendiri berargumen, kalau itu buat menjauhi terbentuknya korban akan lebih besar. Sedemikian itu pula, dikala beliau sedemikian itu intens menemui Habibie serta Soeharto di tengah- tengah desakan orang keatas 2 pentolan Sistem Terkini ini.

Fachry Ali melaporkan lpoinh- lpoinh Gus Dur ini nyata kian menguatkan letaknya intens kancah perpolitikan nasional. Atas aksi itu nampak kalau beliau yakni figur akan dapat berjumpa atas golongan manapun.

Daya Gus Dur selaku malim serta atasan pemeluk akan dikira berkompeten keatas situasi bangsa dikala itu, nampak nyata dikala sebuatan buatan mahasiswa menginisiatifkan dikerjakannya pertemuan selah tokoh- tokoh berarti. Atas inisiatif Mahasiswa, berkumpullah 4 figur ialah, Gus Dur, Amien Rais, Megawati, serta Sri Buatnda Hamengkubowono X. Pertemuan ini dilangsungkan di adres Gus Dur di Ciganjur akan setelah itu diketahui atas gelar Keterangan Ciganjur. Atas pertemuan itu diperoleh 8 biji perjanjian selah lain kemauan buat dikembalikannya independensi orang serta diberdayakannya lembaga-

lembaga perwakilan selaku penjelmaan harapan orang akan memprioritaskan kebutuhan orang bukan kebutuhan penguasa.

Ekspedisi masa pembaruan diisyarati atas dilaksanakannya pemilu tahun 1999. Habibie akan ditolak informasi pertanggungjawabannya oleh MPR, wajib turun atas jabatannya selaku kepala negara. Dikala inilah, kiprah politik Gus Dur terus menjadi menguat. Beliau berinisiatif mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa(PKB). Masuknya Gus Dur selaku figur berarti di PKB, kian menguatkan dirinya selaku politikus akan berbasiskan massa terbanyak atas golongan Islam.[10]

D. Penetapan Gus Dur Sebagai Presiden

Di dasar kepemimpinan Habibie, orang belum puas hendak kinerjanya. Atas bertepatan atas 10 November 1998, unjuk rasa akan didominasi oleh mahasiswa menuntut supaya Habibie lekas memberikan kewenangan atas rezim peralihan akan dipandu oleh Presidium kepemimpinan pro- reformasi akan terdiri atas Megawati(PDI- P), Gus Dur(PKB), Amien Rais(PAN), Uskup Belo serta Buatnda Hamengkubuwono X.

Walaupun mengalami titik berat besar atas mahasiswa akan menuntut pembuatan rezim peralihan serta antipati keatas perkembangan kekuasaannya, Kepala negara BJ Habibi memilah buat merespon atas cara konstitusional serta tidak represif. Beliau menakankal desakan buat mundur atas cara langsung serta memberikan kewenangan di luar metode hukum akan legal. Kebalikannya, Habibi senantiasa melaksanakan rezim sampai

[10] Henny Yusalia, "Ulama dan Politik..., 26.

konferensi Biasa MPR 1999 dimana beliau mengantarkan informasi pertanggungjawaban atas kinerjanya sepanjang era peralihan.

Berikutnya, penentuan biasa juga dicoba. PDI- P di dasar arahan Megawati sukses mendiami tingkatan awal, menaklukkan Golkar akan sepanjang Sistem Terkini mengetuai akuisisi suara. Tempat ketiga serta keempat diduduki oleh PKB akan diketuai oleh Matori Abdul Djalil serta PPP akan dipandu oleh Hamzah Haz. Antrean berikutnya dihuni oleh PAN arahan Amien Rais, akan kesimpulannya bawa beliau buat mendiami kedudukan Pimpinan MPR.

Kategorisasi rezim jadi kewajiban Kepala negara akan hendak diseleksi oleh MPR atas 700 anggotanya intens bulan Oktober 1999. Oleh sebab itu, lama saat sebelum hasil pemungutan suara diumumkan atas bertepatan atas 1 September, pusat atensi para atasan partai beralih. Jika awal mereka memperjupoinn sokongan orang, saat ini mereka berpindah ke negosiasi di selah mereka buat menduga bersama mungkin perlunya aliansi.

Selama nyaris semua kurun durasi selah penentuan biasa serta penentuan kepala negara, calon akan terletak sangat depan mengarah bangku kepresidenan yakni calon atas Golkar, Habibie serta calon atas PDI- P Awan. Awal mula Megawati memercayakan sokongan PKB serta PAN, mitra- mitra PDI- P intens aliansi informal akan timbul atas apa akan diucap Maklumat Paso bertepatan atas 18 Mei, sedpoinn Habibie bertumpu atas sokongan PPP serta tentara, serta mengatakan Wiranto selaku Wapres akan mengarah dipilihnya esok.

Kemajuan terutama intens bulan- bulan sehabis penentuan biasa yakni kedatangan apa akan diucap Poros Tengah, suatu federasi partai- partai mukmin akan dirintis oleh Hamzah Haz serta diumumkan oleh Amien Rais atas bertepatan atas 20 Juli 1999. Logikanya yakni kalau atas jumlah kombinasi sebesar dekat 200 bangku di MPR, partai- partai mukmin bisa melawan Golkar ataupun PDI- P, alhasil berposisi buat menaruh calonnya di Kastel. Calon akan disetujui yakni Abdurrahman Satu.

Tidak hanya itu, Golkar sendiri jauh atas utuh. Buatan reformis arahan Akbar Tanjung serta Marzuki Darusman tidak bahagia atas penamaan Habibie. Ini membuat Marzuki mengajukan ajuan beberapa julukan lain buat dicalonkan jadi Kepala negara, di intensnya ada sebuatan julukan tercantum Jendral Wiranto, akan durasi itu berprofesi selaku Komandan Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Menteri Pertahanan serta Keamanan Nasional. Timbul pula pemikiran kalau buatan Akbar hendak berasosiasi atas Megawati buat membatasi mungkin kalau buatan Poros Tengah akan mukmin hendak mengutip kewenangan.

Intens atmosfer Sang MPR akan diselenggarakan di dasar arahan Amien Rais, Konferensi menakankal pertanggungjawaban kepala negara RI ke- 3 Profesor B. J Habibie, serta sehabis itu Golkar kehabisan calon presidennya. Setelah itu Golkar berikan suara buat berpindah atas Gus Dur, atas memilah Megawati. PAN akan dibuat Amien Rais bersama PK akan berwarna Islam membuat buatan pembaruan, kemudian mereka mengpoint Gus Dur ke bangku kepala negara.

Ceramah pertanggungjawaban Habibie ditanggapi skeptis jauh saat sebelum dibacakan. Pertanggungjawaban Habibie itu sudah ditaksir atas cara apriori oleh beberapa buatan serta badan MPR apalagi saat sebelum Kepala negara Habibie mengantarkan laporannya terdapat pihak- pihak di MPR akan menakankal ceramah pertanggungjawaban itu, sementara itu mereka belum melihatnya.

Ceramah pertanggungjawaban Habibie ditolak disebabkan bermacam alibi salah satunya yakni kebijaksanaannya keatas Timor Timur buat referendum akan kesimpulannya Timor Timur pisah atas Indonesia, lambannya beliau intens memeriksa mantan Kepala negara Soeharto serta tidak melonjaknya perekonomian Indonesia.

Gus Dur memanglah relative diperoleh seluruh pihak serta akan lebih berarti lagi, warnanya beliau sudah menemukan berkat atas K. H. Abdullah Faqih atasan Pondok Madrasah Langitan Tuban akan amat disegani masyarakat NU. Berkat ini membuat buatan PKB, akan lebih dahulu mensupport Megawati, beralih serta membahu seluruhnya atas Gus Dur. Bangunan MPR 20 Oktober 1999, Konferensi Biasa MPR berakhir menggemparkan. Gus Dur akan diketahui selaku Pimpinan Biasa PBNU tersaring jadi Kepala negara RI. Beliau menaklukkan Megawati, Pimpinan Biasa PDI- P. Sebesar 373 atas 691 badan MPR membuatkan suaranya buat Ajengan itu. Menaiknya Gus Dur tidak bebas atas aspek Poros Tengah akan dimotori oleh Amien Rais.

Disisi lain banyak akan tidak berpikir kalau Gus Dur tersaring jadi

kepala negara. Banyak pihak berpikir pertarungan hendak dimenpoinn oleh Megawati. Perihal ini disebabkan situasi raga Gus Dur kala itu telah lelah. Apalagi banyak pula akan membimbpoinn Gus Dur dapat melaksanakan tugasnya selaku kepala negara atas cara wajar. Beliau hadapi cacat raga berbentuk kebutaan atas mata kiri serta beberapa atas mata kanan. Pandangannya mulai memburuk sebab glaukoma semenjak tahun 1985, serta diperparah oleh suatu musibah di mana beliau terbentur mobil akan menyebabkan lenyapnya retina.

Atas dikala pelantikannya selaku kepala negara, beliau dibantu oleh seseorang opsir Pointan Bumi akan berperan selaku asisten atas membaca balik bacaan ikrar kepala negara. Walaupun ketentuan jadi atasan negeri wajib segar raga serta panca inderanya, Gus Dur jadi dispensasi. Gus Dur senantiasa dinaikan jadi kepala negara walaupun situasi fisiknya tidak seluruhnya segar. Beliau yakni kepala negara Indonesia awal serta sampai dikala ini salah satunya akan mempunyai cacat raga.

Gus Dur akan mengambil alih Habibie sebab pertanggungjawabannya ditolak intens konferensi biasa MPR, mengemban berantai kepemimpinan nasional akan tidak enteng. Gus Dur dihadapkan atas perkara bangsa akan menuntut buat secepatnya dicarikan jalur keluarnya, alhasil Indonesia bisa bangun atas keterpurukannya intens aspek ekonomi serta bidang- bidang akan lain. Peninggalan kekurangan, pemutusan ikatan, kemerosotan poin ubah rupiah, hutang luar negara satu buatan, disisi lain desakan skedul pembaruan wajib bersama menemukan atensi akan serius.

BAB III
SIYASAH SYAR'IYAH

Atas amatan politik Islam, ada 3 sebutan berarti akan jadi alas pandangan serta aplikasi rezim, ialah siyasah syar' iyyah, fikih siyasah, serta pandangan politik Islam. Ketiganya bersama berhubungan atas aturan mengurus kewenangan serta rezim intens perspektif Islam, tetapi mempunyai titik tekan akan berlainan.

Siyasah syar' iyyah merujuk atas kebijaksanaan ataupun aksi politik akan dicoba oleh penguasa buat faedah pemeluk, sepanjang tidak berlawanan atas prinsip- prinsip syariat Islam walaupun tidak atas cara akurat dituturkan intens nash(al- Qur' an serta perkataan nabi). Rancangan ini menekankan elastisitas intens pengumpulan ketetapan politik. Sedpoinn itu, fikih siyasah lebih bertabiat normatif serta tekstual, ialah hukum- hukum fiqh akan menata hal kenegaraan atas cara rinci bersumber atas dalil- dalil syar' i.

Pandangan politik islam yakni refleksi intelektual pemeluk Islam selama asal usul hal sistem politik, penguasa serta kewenangan bersumber atas prinsip- prinsip Islam.

Atas begitu, ikatan selah ketiganya bertabiat silih memenuhi, di mana fikih siyasah berikan batas hukum akan jelas, siyasah syar' iyyah membuatkan ruang ijtihad intens mengalami gairah sosial- politik akan lalu bertumbuh. Sebaliknya pandangan politk Islam jadi alas teoritis serta poin bawah buat siyasah syar' iyah serta fikih siyasah. Ulasan ini difokuskan atas rancangan siyasah syar‘ iyyah selaku alas normatif serta efisien intens sistem rezim Islam, selanjutnya penjelasannya.

A. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Atas cara etimologi siyasah berawal atas tutur ialah(ساس) sasa. Tutur Siyasah ataupun siyasiyah akan ialah wujud masdar ataupun tutur barang abstrak atas tutur sasa, mempunyai banyak arti ialah mengemudi, mengatur, otak, metode pengaturan. Bertepatan atas salah satu hadit' s akan melaporkan.

" Atas Abi Hurairah Rasulullah SAW berfirman: Anak cucu Israil dikendalikan oleh nabi- nabi mereka(HR Mukmin)".

Sâsa pula berarti menata, mengurus serta menyuruh ataupun perintahan, politik serta pembuatan kebijaksanaan.

Tutur as- siyasaah ialah tutur lapisan atas bahasa Arab asli. Ada pula maknanya, selah lain yakni pengaturan, edukasi, advis, serta koreksi. Sebaliknya sebutan as- siyasah asy- syar' iyyah(politik syar' i), tercantum sebutan uniterm(terpakai intens banyak sebutan, tidak cuma atas satu sebutan saja), apalagi banyak memiliki signifikasi. Oleh sebab itu, lafazh" as- siyaasah" sudah dipakai atas lebih atas satu arti.

Siyasah berarti pula rezim serta politik ataupun membuat kebijaksanaan(politic serta policy). Tidak hanya itu, Siyasah pula bisa dimaksud administrasi serta manajemen.

Abdul Wahab Khallaf mendeskripsikan kalau Siyasah yakni pengaturan perundangan akan dilahirkan buat menjaga kedisiplinan serta faedah dan menata faedah biasa buat negeri Islam atas metode menjamin konkretisasi faedah serta menakankal kemudratan atas tidak melampui batas- batas syar'

iyah serta fundamental syar' iyah akan kully, walaupun tidak cocok atas opini malim mujtahid.

Abbdurrahman Taj akan diambil oleh Muhammad Iqbal membuatkan penafsiran kalau siyasah syariyah ialah hukum akan menata permasalahan ketatanegaraan buat ruh(antusias) hukum syariah atas cara global buat menghasilkan tujuan sosial, walaupun pengaturanya tidak terdapat intens prinsip alQur' an.

Ibnu' Aqail diambil atas A Djazuli melaporkan siyasah syar' iyah yakni suatu aksi akan atas cara efisien bawa orang dekat atas faedah serta bebas atas kehancuran, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya serta apalagi Allah SWT tidak menentukannya.

Siyasah syar' iyah akan dikemukakan Ibnu Aqail memiliki sebuatan penafsiran. Awal, kalau aksi ataupun kebijaksanaan siyasah itu buat kebutuhan orang banyak. Ini membuktikan kalau siyasah itu dicoba intens kondisi warga serta kreator kebijaksanaannya tentulah orang akan memiliki daulat intens memusatkan khalayak. Kedua, kebijaksanaan akan didapat serta diiringi oleh khalayak itu bertabiat pengganti atas sebuatan opsi akan pertimbangannya yakni mencari akan lebih dekat atas faedah bersama serta menghinatas terdapatnya aib. Perihal semacam itu memanglah salah satu watak khas atas siyasah akan penuh agen serta opsi. Ketiga, siyasah itu intens area ijtihadi, ialah intens urusan- urusan khalayak akan tidak terdapat ajaran qathi atas al- Quran serta Sunnah melainkan intens area wewenang pemimpin kalangan muslimin. Selaku area ijtihadi hingga intens siyasah akan kerap dipakai yakni pendekatan

qiyas serta arti mursalah. Oleh karena itu, bawah penting atas terdapatnya siyasah Syar' iyyah yakni agama kalau syariat Islam diturunkan buat faedah pemeluk orang di bumi serta alam baka atas melemppoinn hukum akan seadil-adilnya walaupun metode akan ditempuhnya tidak ada intens al- Quran serta Sunnah atas cara akurat.

Bila diamati atas siyasah syar' iyah faedah dipecah jadi 3, akan awal yakni harus melaksanakannya, kedua bila dilaksanakan sunnah, serta ketiga terdapat akan mubah melaksanakanya. Faedah wajib penuhi patokan selaku selanjutnya ini:

1. Faedah bersumber atas maqashid al- syari' ah, antusias anutan, dalil-dalil kulli serta ajaran qoth' i bagus wurud ataupun dalalahnya.

2. Faedah akan dapat memastikan, maksudnya wajib dapat dipercayai buat dicoba, penuh kehati- hatian, cermat, serta tidak diragukan dapat bawa khasiat serta menjauhkan merugikan.

3. Faedah akan mendatpoinn atas keringanan serta menghinatas kesusahan(kemudhratan), maksudnya kemasahlahatan bisa dilaksanakan.

Bersumber atas defenisi- defenisi akan dikemukakan para pakar di atas bisa ditemui dasar Siyasah Syar' iyyah, ialah:

1. Kalau Siyasah Syar' iyyah berkaitan atas pengasuh serta pengaturan kehidupan orang.

2. Kalau pengurusan serta pengaturan ini dicoba oleh pemegang kewenangan(ulu alamri).

3. Kalau tujuan pengaturan itu yakni buat menghasilkan faedah serta menakankal kemudaratan(jalb al- masalih wa daf' al masalih wa daf' al mafasid).

4. Kalau pengaturan itu tidak bisa berlawanan atas ruh ataupun antusias syari' at Islam akan umum.

Siyasah Syar' iyyah selaku suatu akan berawal atas hasil pandangan serta pengertian malim ini ataupun selaku salah satu agen ilmu akan lain ialah mempunyai watak relatif serta membolehkan terdapatnya perbandingan aplikasi atas durasi serta tempat akan berlainan. Menakanka kalau pemeluk Islam wajib mempraktikkan bentuk, bentuk, sistem politik begitu juga akan dipraktikkan Rasul Muhammad di Madinah ataupun khulafau rasyidun tanpa membuatkan ruang sedikit juga buat berlainan bentuk, bentuk, serta sistem yakni asumsi akan tidak searah hukum gairah sosial ataupun tidak cocok atas watak fleksibilitas anutan instrumental Islam.[1]

Bisa disimpulkan sebenarnya siyasah Syar' iyyah ialah tiap kebijaksanaan atas penguasa akan tujuannya melindungi faedah orang, ataupun melemppoinn hukum Allah, ataupun menjaga etika, ataupun menaburkan keamanan di intens negara, atas apa- apa akan tidak berlawanan atas nash, bagus nash itu terdapat(atas cara akurat) atau tidak terdapat(atas cara sugestif). Tujuan penting siyasah Syar' iyyah yakni terciptanya suatu sistem pengaturan negeri akan Islami serta buat menarpoinn kalau Islam menginginkan

[1] Ridwan, *Fiqh Politik*..., 77.

terciptanya sesuatu sistem politik akan seimbang buat mewujudkan faedah buat pemeluk orang di seluruh era serta di tiap negeri.

B. Objek dan Lingkup S*iyasah Syar'iyah*

Tiap ilmu mempunyai subjek serta ruang lingkup serta ulasan, dan sedemikian itu pula atas siyasah syariyah. Atas cara spesial bisa dipahami kalau siyasah syariyah itu besar cakupannya, mencakup bermacam pandangan pengaturan akan dijalani penguasa sesuatu negeri. Oleh sebab itu, siyasah syariyah menekuni seluruh suatu berhubungan atas pengurusan negeri serta rezim berlandasan hukum syariah.

Terdapat perbandingan opini selah malim serta pakar hukum intens memastikan siapa akan hendak mangulas siyasah syariyah. Intens kitabnya Pemimpin al- Mawardi ialah al- Ahkam al Sullthaniyah, lingkupan siyasah syar' iyah mencangkup kebijaksanaan penguasa mengenai peraturan perundang- undangan(siyasah dusturiyah), ekonomi serta moneter(siyasah maliyah), peradilan(siyasah qadaiyah), hukum perang(siyasah harbiyah), serta administrasi negeri(siyasah iatasyah). Buat Ibn Taimiyah, subjek amatan fikih siyasah dibuat jadi 4: ialah peradilan, administrasi negeri, moneter serta ikatan global. Abdul Wahab Khallaf menarpoinn subjek siyasah syar' iyah yakni pembuatan peraturan perundang- undangan akan dituntut oleh perihal ikhwal kenegaraan atas bidang kesesuaian atas fundamental anutan agama serta ialah realisasi faedah orang dan penuhi kebutuhannya. Abdul Wahhab Khallaf memperkecil subjek kajiannya, ialah peradilan, ikatan Global serta finansial negeri.

Subjek amatan siyasah syar' iyah buat Hasbi ash- Shiddieqy yakni seluruh suatu profesi orang berbentuk pengurusan, bersumber atas poin serta atas jiwa syariah, akan tidak ditemui dalilnya spesial dan tidak berlawanan atas nash. Siyasah lebih mementingkan atas titik pandangan pengurusan serta pengaturan negeri akan terdiri atas politik peraturan perundang ajakan(siyasah dusturiyah syar' iyah), penentuan kebijkasanaan hukum(siyasah tasyri' iyah syar' iyah), kebijaksanaan peradilan(siyasah qadhiyah syar' iyah), kebijaksanaan ekonomi(siyasah maliyah syar' iyah), politik penerapan hukum(siyasah tanfidziyah syar' iyah), politik ikatan Global(siyasah dauliyah), politik administrasi negeri(siyasah iatasyah syariyah).

Suyuti Pulungan membuktikan perbandingan subjek fikih siyasah atas sebuatan opini malim, setelah itu beliau menarik kesimpulan kalau subjek amatan akan awal yakni peraturan serta perundangan- undangan negeri selaku referensi serta alas idil buat menghasilkan kebaikan pemeluk. Kedua yakni pengorganisasian serta pengaturan buat menciptakan faedah. Ketiga yakni pengaturan ikatan dampingi penguasa serta orang dan terdapatnya hak serta peranan, dampingi orang serta penguasa buat menggapai tujuan negeri.

Atas cara garis besar mencakup 4 aspek selaku selanjutnya:

1. Siyasah dusturiyah, yakni siyasah akan menata bawah peraturan mengenai wujud serta sistem rezim, pemisahan kewenangan, suksesi kepemimpinan, hak- hak bawah masyarakat negeri, ataupun diucap intens istilah konstitusi. Siyasah dusturiyah ini terdiri atas:

a. Siyasah tasyri' iyyah yakni siyasah akan berhubungan atas suatu ketetapan intens membuat hukum serta mengeluarkan kebijaksanaan akan berkaitan atas faedah warga.

b. Siyasah tanfdzhiyyah mengenai pembuatan serta penerapan peraturan perundang- undangan cocok atas syariat Islam.

c. Siyasah qadhaiyyah yakni usaha badan intens menerapkan peraturan perundang- undangan ataupun diucap pula badan peradilan.

d. Siyasah iatasyyah mencangkup di intensnya permasalahan administratif kepegawaian.

2. Siyasah dauliyah atau kharajiyah, yakni siyasah akan berkaitan atas pengaturan ikatan global intens Islam. Bisa berbentuk kerjasama negeri mukmin atas negeri non mukmin, hubungan diplomatik, serta akan lain.

3. Siyasah maliyah, ialah siyasah akan berkaitan finansial intens sesuatu Negeri, bagus itu pendapatan finansial negeri serta juga pengeluarannya. Pendapatan harta kekayaan negeri bisa berbentuk ppoinl atas atas pajak, jiziyah, kharaj, serta lainya.

4. Siyasah harbiyah, siyasah akan berkaitan atas pengaturan bersenjata, bagus itu peperangan serta perihal lain akan berkaitan atas perdamaian, penghentian sejata, tawananan perang, serta lainya.

Cangkupan atas lingkup amatan fiqh siyasah ataupun siyasah syariyah ini

amat besar, hingga intens lpoinh perkembagan fiqh siyasah berusia ini, para pakar mengajukan pembidangan akan berbeda- berbeda dampingi satu atas lainya, perbandingan ini dilatar- belakangi oleh kasus intens sesuatu negeri, adat, tingkatan pembelajaran serta asal usul kemajuan Islam.

Terdapatnya perbandingan opini di atas, pembidangan fiqih siyasah bisa diserderhanakan jadi 3 bahagian ulasan. Awal politik perundangundangan(siyasah dusturiyah), kedua politik luar negara(siyasah dauliyah atau harbiyah), serta akan ketiga politik finansial(siyasah maliyah). Uraian pendek hal cangkupan ulasan fiqih siyasah bisa di pahami kalau fundamental atas fiqih siyasah berhubungan akrab atas atas permasalahan pengaturan serta pengurusan politik kenegaraan.[2]

C. Penetapan Hukum intens *Siyasah Syar'iyah*

Intens kerpoin siyasah syar' iyah, seseorang atasan diberi daulat buat memutuskan kebijaksanaan di bermacam pandangan kehidupan, sepanjang tidak berlawanan atas prinsip- prinsip syariat Islam. Bagus itu di aspek politik, ekonomi, hukum serta Hukum. Atas cara mendetail wewenang siyasah syar' iyyah sedikitnya melingkupi 2 puluh aspek, ialah:[3]

1. Aqdul Imamah ataupun kaharusan serta aturan metode kepemimpinan intens Islam

akan merujuk atas syura.

[2] Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 64.

[3] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa AlWilayah Ad-Diniyyah,* terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

2. Taqlidu al- Wizarah ataupun penaikan administratur menteri akan mengandung

2 pola. Ialah wizarah tafwidhiyyah serta wizarah tanfidziyysah.

3. Taqlid al- imârah versi al- bilâd, penaikan administratur negeri semacam gubernur, orang tua negara, ataupun kepala wilayah serta serupanya.

4. Taqlid al- imârat versi al- jihâd, mengangkut para administratur tentara, panglima

perang serta serupanya.

5. Area versi hurûbi al- mashâlih, ialah wewenang buat melawan para disiden ataupun ahl al- riddah.

6. Wilayatu al- qadha, wewenang intens memutuskan para atasan majelis hukum, para qadhi, juri serta serupanya.

7. Wilayatu al- madhalim, wewenang menyudahi sengketa di selah rakyatnya atas cara langsung atau menunjuk administratur khusus.

8. Wilayatun niqabah, wewenang menyensus masyarakat, membukukan serta menulis nasab tiap golongan warga atas rakyatnya.

9. Area versi imamati ash- shalawat, wewenang mengimami shalat baik

atas cara langsung ataupun mengangkut aparat khusus.

10. Area versi al- hajj, wewenang serta tanggungjawab intens jasa penajaan kepergian haji serta intens mengetuai penerapannya.

11. Area versi al- shadaqat, wewenang mengatur penerapan amal, infaq serta shadaqat warga atas mulai pengutusan amilin, pengumpulan hingga penyaluran serta determinasi para mustahiknya.

12. Area versi al- fai wal gahnimah, wewenang pengurusan dan pembuatan copetan perang.

13. Area versi al- wadhI al- jizyah wal kharaj, wewenang menetapkan bea pajak jiwa atas kalangan ateis serta banderol bea atas barang- barang komoditi.

14. Fima takhtalifu al- ahkamuhu minal bilad, wewenang memutuskan setatus sesuatu area atas kekuasaannya.

15. Ihya' u al- mawat wa ikhraju al- miyah, wewenang membuatkan permisi intens awal serta kepemilikan tanah tidak bertuan serta pengerukan mata air.

16. Area Fil himâ wal arfâq, wewenang menata serta memastikan batasan area khusus selaku kepunyaan negeri, ataupun area pelestarian alam, hutan lindung, cagar adat, serta serupanya.

17. Area Fi ahkami al- iqtha, wewenang membuatkan satu aspek tanah ataupun satu area buat kebutuhan seseorang ataupun segerombol rakyatnya.

18. Area fi wadhi dîwân, wewenang memutuskan badan akan menulis serta melindungi hak- hak kewenangan, kewajiban profesi, harta kekayaan, para aparat pengawal keamanan negeri(pointan), dan para pegawai.

19. Area fi ahkami al- jarâim, wewenang intens memutuskan ganjaran hudu serta tazir buat para pelakon kemaksiatan, aksi pelanggaran serta kesalahan semacam peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan serta pembantaian.

20. Area fi ahkami al- hisbah, wewenang intens memutuskan lembaga pengawasan.

Ibnu Taimiyah mengupas sebuatan permasalahan akan masuk intens wewenang siyasah syar' iyyah.

Dia melandaskan filosofi siyasah syar' iyyah, begitu juga sabda Allah SWT intens Pesan An Nisa buatan 58 serta 59.

Maksudnya: Sebetulnya Allah memerintahkan kalian mengantarkan mandat atas akan berkuasa menerimanya, serta(memerintahkan kalian) bila memutuskan hukum di selah orang biar kalian memutuskan atas seimbang. Sebetulnya Allah berikan pengajaran akan sebaik- baiknya keatasmu. Sebetulnya Allah yakni Maha mengikuti lagi Maha memandang.

Hai banyak orang akan beragama, taatilah Allah serta taatilah Rasul(Nya), serta ulil amri di selah kalian. Setelah itu bila kalian berbeda Opini mengenai suatu, Hingga kembalikanlah beliau atas Allah(Al Quran) serta Rasul(sunnahnya), bila kalian betul- betul beragama atas Allah serta hari setelah itu. akan begitu itu lebih penting(buatmu) serta lebih bagus akhirnya.(QS. An Nisa': 58- 59)

Dimana kedua buatan itu buat dia yakni alas kehidupan warga mukmin akan berhubungan atas hak serta peranan selah atasan serta orang. Buatan awal bermuatan peranan serta wewenang para atasan lagi buatan kedua bermuatan peranan orang keatas pemimpinnya. Atas cara garis besarnya, beralasan buatan awal(An Nisaa 58), peranan serta wewenang atasan yakni menunaikan mandat serta melemppoinn hukum akan seimbang. Lagi peranan orang yakni patuh atas

atasan sepanjang mereka patuh atas Allah serta Rasul- Nya(buatan An Nisaa akan ke 59).

Peranan penguasa intens menunaikan mandat mencakup pengpointan

para administratur serta karyawan atas cara betul atas memilah banyak orang akan pakar, jujur serta tepercaya, pembuatan unit akan diperlukan intens

melaksanakan kewajiban negeri, mengatur duit orang serta duit negeri atas amal,

infaq, shadaqah, fai serta ghanimah dan seluruh masalah akan berhubungan atas

mandat kekayaan.

Lagi siyasah syar' iyyah intens aspek penguatan hukum akan seimbang berikan kewajiban serta wewenang atas penguasa buat membuat majelis hukum, mengangkut qadhi serta juri, melaksalanakan ganjaran hudud serta tazir keatas pelanggaran serta kesalahan semacam pembantaian, penganiyaan, perzinaan, perampokan, peminum khamer, serta sebuatnya dan melakukan konferensi intens perkara- perkara akan wajib dimusyawarahkan.

Sedpoinn itu, Ibnu Qayyim meluaskan ulasan siyasah

syar' iyyah intens penguatan hukum akan tidak ada nash ataupun dalilnya

atas cara langsung atas al- Quran ataupun Hadits. Hingga dia menguraikan

jauh luas permasalahan akan berhubungan atas kasus- kasus hukum kegiatan serta majelis hukum. Dia mengantarkan bermacam ulasan akan ialah ilustrasi permasalahan penentuan hukum atas pendekatan siyasah syar' iyyah.

Selah lain yakni mengenai penentuan hukum akan pembuktiannya bersumber atas pertanda(intensitas dorongan hati serta mata hati juri), amarat(isyarat ataupun ciriciri akan kokoh), serta qarâin(indikasi- indikasi akan tersembunyi). Begitu pula dia mangulas mengenai memutuskan hukum bersumber atas al- Qurah ataupun atas metode memilih, saksi orang ateis, saksi perempuan, memforsir terspoin biar mahu membenarkan perbuatannya, serta serupanya.

Diselah alasan akan melandasi terdapatnya kebijaksanaan politik syariat yakni apa akan sudah dikemukankan di wajah kalau inti atas syariat Islam yakni menegakan kesamarataan, faedah serta keceriaan orang di bumi serta alam baka. Hingga meski atas cara tekstual tidak ada di intens al- Quran serta Hadits, namun bila telah jelas terdapat kesamarataan serta faedah hingga disitulah hukum Allah terletak serta bukanlah bisa jadi berlawanan atas syariat.

Disamping itu terdapat fakta historis kalau keputusan- keputusan hukum

akan dilaksanakan atas era Khulafaur Rasyidin akan membawa alamat selaku kebijaksanaan siyasah intens aspek hukum. Di selah contoh- contoh itu yakni:

1. Aksi Ustman membakar catatan- catatan ajaran akan dipunyai para kawan atas cara perorangan buat disatukan intens mushaf Pemimpin. Kebijaksanaan ini serupa sekali tidak menemukan ajaran atas bacaan al- Quran ataupun Hadits Rasul, namun kebijaksanaan politik Utsman buat faedah pemeluk serta persetujuan beberapa besar atas kawan akan lain membuktikan kesahan ketetapan itu.

2. Ketetapan Ali memidana bakar kalangan zindik buat memunculkan efek kapok atas aksi akan dikira kesalahan luar lazim. Sementara itu Rasulullah sendiri memusuhi memidana atas metode membakar.

3. Ketetapan khalifah Umar buat tidak memidana potong tangan pencuri akan miskin di era darurat, tidak membuatkan buatan amal keatas muallaf atas golongan musyrik, serta memutuskan jatuh perceraian 3 intens satu majlis.

4. Aksi Abu Bakar akan menyudahi melawan para pembpoinng amal sementara itu mereka sedang selaku mukmin akan bersyahadat serta melaksanakan peranan shalat.

Ada pula pendekatan amatan serta aplikasi Siyasah Syar' iyyah

memakai tata cara Qiyas, al Maslahatul Mursalah, Saddud Dzariah dan

Fathud Dzariah, Al- Adah, Al Istihsan, serta kaidah- kaidah kulliyah fiqhiyah.

D. Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Prinsip atas Siyasah yakni negeri ataupun rezim Islam. Prinsip ataupun dasar yakni bukti akan jadi bawah berasumsi, berperan serta serupanya, prinsip(al ashl) intens bahasa Arab berarti suatu akan dijadikan bawah atas gedung, ataupun bawah akan di atasnya ditegakkan suatu perihal akan bagus serta bertabiat materil ataupun immateril. Prinsip- prinsip rezim Islam yakni bukti akan dijadikan bawah penajaan rezim intens perspektif Islam. Prinsip atas rezim Islam didasarkan atas 9 prinsip penting akan bertabiat telak ialah:

1. Prinsip kewenangan selaku amanah

Intens anutan Islam kewenangan telak cuma kepunyaan Allah sekedar. Agama keatas Allah selaku ppoinl seluruh suatu, tercantum kewenangan serta independensi, ialah landasan penting akan dibutuhkan buat menikamkan gedung warga Islam serta gedung negeri serta rezim. Agama kalangan Muslimin akan dibentuk atas agama independensi Tuhan ini atas gilirannya hendak menyakini kalau Allah memiliki wewenang atas cara telak buat memutuskan hukum buat menata sikap orang.

2. Prinsip musyawarah

Kehidupan warga tetap diwarnai atas bermacam kebutuhan serta kemauan atas tiap- tiap anggotanya. Kemauan akan beraneka ragam ialah kerpoin bentrokan akan bisa mengefekkan bentrokan, antagonisme apalagi keretakan akan bisa mengganggu aturan sosial melainkan bila tiap- tiap badan warga itu akur buat kompromi. Jalur gampang kompromi yakni konferensi.

3. Prinsip proteksi keatas hak asas manusia

Wujud proteksi keatas hak asas intens anutan Islam itu bertumpu atas tujuan diturunkannya syari' at Islam, ialah buat mencegah serta menjaga kebutuhan hidup orang bagus materil ataupun spirituil, perseorangan serta sosial. Prinsip proteksi mencakup, proteksi keatas Agama, jiwa, ide, generasi serta harta.

4. Prinsip persamaan

Allah memandang orang atas cara serupa tanpa melainkan ciri apapun. Seluruh mnusia berawal atas satu generasi ialah atas Adam serta Hawa, begitu juga dituturkan selaku Selanjutnya,(QS. an- Nisa, 4: 1).

Maksudnya:“ Hai sekaligus orang, bertakwalah atas Tuhan- mu akan sudah menghasilkan kalian atas seseorang diri, serta atas atasnya Allah menghasilkan isterinya; serta atas atas keduanya Allah memperkembang biakkan pria serta wanita akan banyak. serta bertakwalah atas Allah akan atas(mempergunakan) nama- Nya kalian silih memohon satu serupa lain, serta(peliharalah) ikatan silaturrahim. Sebetulnya Allah senantiasa melindungi serta memantau kalian”.

5. Prinsip ketaatan rakyat

Bersumber atas perjanjian malim, malim akur mengenai wajibnya orang utuk patuh atas atasan. Ada perbandingan pengertian mengenai arti“ ulil amri”. Serta pemeluk Islam senantiasa beriktikad Allah selaku pemegang kewenangan ataupun independensi Telak, sebaliknya pemerintrah bertabiat relatif.

6. Prinsip keadilan

Buat Quraish Shihab, terdapat 4 arti kebaikan; awal, seimbang maksudnya serupa(intens hak), kedua, seimbang intens maksud balance(seatasn), ketiga, seimbang berarti membuatkan hak atas akan berkuasa(pemiliknya), keempat, seimbang akan cuma dihubungkan atas Allah.

7. Prinsip peradilan bebas

Prinsip peradilan leluasa menginginkan supaya juri berlaku seperti pemutusan masalah itu leluasa bukan cuma saja atas efek eksternal, namun pula wajib leluasa atas efek intens, sebetulnya juri wajib patuh bukan saja intens keputusan- keputusannya, tetapi pula intens seluruh kesamarataan(menyudahi masalah) serta mencegah hak- hak orang.

8. Prinsip perdamaian

Atmosfer rukun yakni idaman seluruh orang intens

menempuh kehidupan. Intens bagan menciptakan itu, anutan Islam muat ketentuan pergaulan dampingi orang, melenyapkan sebab- sebab akan bisa melahirkan bentrokan serta petikaian.

9. Prinsip kesejahteraan

Prinsip keselamatan bermaksud buat menciptakan kesamarataan sosial serta kesamarataan ekonomi buat semua badan warga ataupun orang. Kesamarataan sosial melingkupi pelampiasan keinginan materil ataupun kebendaan serta keinginan kebatinan buat semua orang. Aplikasi prinsip keselamatan dimaksudkan buat kurangi serta apalagi melenyapkan lembah pemisah ekonomi serta sosial di selah badan warga. Penguasa memiliki hak buat mengaitkan diri intens perekonomian warga, apalagi ialah salah satu peranan akan memilikinya buat menciptakan serta menjaga keselamatan sosial.[4]

[4] Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi*..., 283.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penetapan dan Persyaratan Kepala Negara Buat *Siyasah Syar'iyah*

Kepemimpinan ialah sesuatu perihal akan berarti buat diulas atas

era ke era. Kepemimpinan mempunyai posisi akan esensial karena kendali

terdapat atas tangan seseorang atasan. Kala mangulas kepemimpinan, hingga terdapat sebuatan perihal akan melingkupi di intensnya semacam orang akan mengetuai, metode ataupun rancangan mengetuai sampai metode penentuan atasan.

Intens pemikiran siyasah syar' iyah, rezim wajib dipandu oleh seorang akan mempunyai kapasitas buat melemppoinn hukum- hukum Allah, melindungi faedah pemeluk serta menghinatas kehancuran di wajah alam. Oleh sebab itu saat sebelum memutuskan seseorang kepala negeri, ada beberapa patokan akan wajib diatasti. Ada pula banyak orang akan berkuasa dicalonkan selaku kepala negeri wajib mempunyai 7 ketentuan. Perihal ini begitu juga akan dituturkan oleh Pemimpin al- Mawardi ialah.

1. Penyeimbang(al-‘ yakni)

Ketentuan awal akan wajib dipunyai oleh seseorang calon kepala negeri yakni mempunyai penyeimbang(al-‘ yakni). Seimbang ataupun pantas akhlak buat calon kepala negeri islam tidak berarti beliau terpelihara atas kekeliruan perkataan, aksi serta perilakunya. Karena watak ma' syum cuma dipunyai para rasul, akan memanglah bisa proteksi eksklusif atas Allah atas aksi maksiat. Sebaliknya mukmin lazim tidak tertutup mungkin

melaksanakan kekeliruan serta dosa- dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan lumayan atas istigfar atas aksi salah serta kesalahan kecil.

Jadi akan diartikan atas pantas akhlak yakni kalau calon atasan negeri islam, melakukan peranan serta damai islam atas bagus atas senantiasa menghinatas dosa- dosa besar, tidak lalu menembus melaksanakan dosa-dosa kecil, berbicara tutur akan jujur, nampak konsisten menggenggam tepercaya, jauh atas meragukan, bisa mngendalikan diri dikala bahagia serta marah, tidak atas cara berterus terang melaksanakan maksiat serta tidak berperan dzalim intens rezim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkut kepala negeri akan buruk sebab ia menyepelehkan ketentuan agama tidak hirau atas aksi kesalahan.

2. Memiliki ilmu pengetahuan

Ketentuan akan kedua memiliki ilmu wawasan akan buatnya bisa melaksanakan ijtihad buat mengalami insiden akan mencuat serta buat membuat kebijaksanaan hukum. Ketentuan kepala negeri wajib mempunyai ilmu wawasan sebab selaku atasan negaara, beliau wajib sanggup membuat ketetapan akan pas serta bersumber atas wawasan akan cermat. Ilmu wawasan serta keahlian buat melaksanakan ijtihad hendak menolong kepala negeri intens menguasai permasalahan akan lingkungan serta memastikan kebijaksanaan akan pas buat menanggulangi permasalahan itu. Tidak hanya itu kepala negeri akan mempunyai ilmu wawasan ataupun sanggup buat berijtihad pula hendak lebih sanggup menguasai serta menghormati

perbandingan opini intens masyarakatnya. Perihal ini hendak menolong intens membuat negeri akan inklusif serta menghormati keanekaan.

3. Panca indranya komplit serta sehat

Al- Mawardi melaporkan kalau Ketentuan akan ketiga; pancaindranya komplit serta segar atas pandengaran, pandangan, lidah, serta serupanya alhasil beliau bisa membekuk atas betul serta pas apa akan dibekuk oleh indranya itu.

Salah satu ketentuan kepala negeri wajib komplit panca indranya, sebab selaku atasan beliau wajib sanggup mengetuai atas bagus serta menguasai situasi negeri atas cara global. Atas mempunyai panca alat akan komplit, kepala negeri bisa mendapatkan data serta anggapan akan cermat mengenai situasi sosial, politik, ekonomi serta keamanan negeri. Perihal ini hendak menolong kepala negeri intens mengutip ketetapan akan pas serta efisien buat kebutuhan negeri serta rakyatnya. Tidak hanya itu, kepala negeri akan mempunyai panca alat akan komplit pula bisa berbicara atas bagus atas rakyatnya serta menguasai keinginan serta harapan mereka.

4. Tidak terdapat kekurangan atas badan tubuhnya

Ketentuan akan keempat tidak terdapat kekurangan atas badan badannya akan menghalanginya buat beranjak serta kilat bangun. Seseorang kepala negeri wajib memiliki badan akan komplit tanpa terdapat kekurangan satu alat tubuhpun, sebab seseorang kepala negeri wajib melaksanakan tugas- tugasnya atas efisien serta berdaya guna. Bila seseorang kepala negeri mempunyai kekurangan raga akan penting, semacam kehabisan kaki

ataupun tangan, bisa jadi susah buat mereka buat melaksanakan tugas- tugas selaku kepala negeri atas baik

5. Visi pemikirannya baik

Ketentuan akan kelima visi pemikirannya bagus alhasil beliau bisa menghasilkan kebijaksanaan buat kebutuhan orang serta menciptakan faedah mereka. Seseorang kepala negeri sejatinya wajib memiliki visi keatas negeri serta rakyatnya, beliau pula wajib membuat kontrak sosial akan nyata atas orang, alhasil ketika jadi atasan betul- betul menggantikan serta bawa harapan orang buat faedah bersama. Seseorang atasan tidak bisa memandang orang semacam“ lembu perahan” serta“ fauna mengangon”, melainkan selaku pihak akan wajib dilindungi serta diprioritaskan di atas kebutuhan individu serta kelompoknya. Buat itu, persyaratan kompetensi serta keberpihakan atas kebutuhan orang jauh lebih berarti atas atas kesehatan raga.

6. Memiliki kegagahan serta watak melindungi rakyat

Ketentuan akan keenam memiliki kegagahan serta watak melindungi orang, akan buatnya menjaga rakyatnya serta melawan kompetitor. Kepala negeri wajib sanggup memusatkan diri atas kebutuhan pemeluk, berani serta kuat menyiapkan pointan perang intens mencegah orang serta area negeri, mempunyai energi akal akan bagus memfokuskan benak buat tingkatkan keselamatan umat

7. Memiliki nasab atas kaum Quraisy

Begitu juga uraian malim persyaratan akan terakhir ini buat al-Mawardi bersumber atas determinasi akan disetujui biasa. Usuliyah, hal persyaratan atas orang Quraisy yakni, kalau wujud khabar ini yakni desakan, namun bukan intens perintah tentu, sepanjang belum terdapat gejala akan akan membuktikan pengepresan akan kokoh, alhasil ketetapannya sedang terdapat intens posisi adat, bukan perintah wajib

Intens Islam ada macam sebutan hal kepemimpinan ini, ada

akan mengatakan Imamah serta terdapat pula Khilafah. Tiap golongan intens

Islam mempunyai arti akan berlainan, walaupun terdapat pula akan menyamakan

maksud Khilafah serta Imamah. Bila di negeri Indonesia, atasan disebut

selaku Kepala negara sebaliknya intens Islam atasan diucap selaku Pemimpin.

Imamah kerap dipergunakan intens mengatakan negeri intens kajian

keislaman. Al- Mawardi berkata kalau Pemimpin yakni khalifah, raja,

buatnda ataupun kepala negeri. Buatnya Imamah selaku badan akan

dibangun buat mengambil alih Rasul intens tugasnya melindungi agama dan

menata dunia

Atasan ataupun khalifah yakni pengganti Allah SWT di wajah bumi

buat melaksanakan perintah- Nya. Begitu juga dipaparkan intens sebuah

hadits,“ tidak halal buat 3 orang akan terletak di atasng pasir melainkan mereka mengangkut salah seseorang diselah mereka jadi atasan”

(H. R Ahmad). Perihal ini membuktikan kalau mengangkut seorang

atasan ialah peranan. Tidak hanya itu Islam pula mangulas gimana metode intens penentuan pemimpin

Intens Islam tidak diterpoinn atas cara nyata hal pengpointan

atasan, semacam perkara akan dialami oleh kalangan muslimin setelah

Rasulullah meninggal. Rasulullah tidak memastikan siapa akan akan

mengambil alih dia serta gimana metode pergantian itu dicoba. Alhasil para kawan bermufakat intens memastikan atasan. Bersumber atas memo asal usul terdapat 8 metode intens menetapkan

kepala negeri akan sempat dipraktikkan atas era dini perkembangan

Islam, ialah:

1. Penunjukan langsung oleh Allah

Abu A’ la Al- Maududi, beranggapan kalau Rasul Muhammad Saw

dinaikan selaku kepala negeri awal Islam bukan lewat pemilihan

oleh warga, melainkan lewat penunjukkan langsung oleh Allah.

Al- Maududi menekankan kalau kepemimpinan intens Islam berakar

atas ajaran Ilahi serta bukan atas penentuan pemeluk orang. Nabi

Muhammad Saw berfungsi selaku atasan agama serta politik akan

membuktikan kalau intens Islam, agama serta negeri tidak dapat

dipisahkan.

2. Penunjukan langsung oleh Allah serta Rasul- Nya

Sistem penentuan kepala negeri atas metode penunjukan langsung oleh Allah serta Rasul- Nya merujuk atas agama intens sebuatan adat- istiadat Islam, spesialnya intens gerakan Syiah. Intens gerakan Syiah, dipercayai kalau sehabis rasul Muhammad meninggal kepemimpinan pemeluk Islam tidak dibiarkan sedemikian itu saja namun sudah diresmikan oleh Allah lewat rasul Muhammad. Perihal ini didasarkan atas insiden di sesuatu tempat akan bernama Ghadir Khum, dimana rasul Muhammad berfirman:“ Bukankah saya lebih penting atas diri banyak orang akan beragama?” Hingga para kawan berbarengan menanggapi,“ Benar”. Rasul berfirman,“ Barangsiapa akan saya selaku pemimpinnya, hingga Ali selaku pemimpinnya”. Alhasil kalangan syiah memandang hadits Ghadir Khum itu selaku hadits mutawatir.

3. Penunjukan lewat wasiat

Intens Islam, sistem penentuan kepala negeri ataupun atasan lewat penunjukan atas amanat sempat terjalin intens asal usul dini Islam. Salah satu ilustrasi akan sangat diketahui yakni penunjukan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah Abu Bakar Ash- Shiddiq. Sistem ini yakni wujud atas ijtihad ataupun ketetapan akan didapat oleh seseorang atasan bersumber atas estimasi akan matang buat faedah pemeluk.

4. Penunjukan bersumber atas keturunan

Penunjukan kepala negeri Islam bersumber atas generasi buat

awal kalinya intens asal usul Islam dicoba oleh Muawiyah Ibn Abi

Sufyan atas anjuran Muhghirah Ibn Syu’ ampuh akan ialah gubernur

kuffah dikala itu. Muawiyah menunjuk putranya, Yazid Ibn Muawiyah selaku putra kekuasaan akan hendak menggantinya selaku khalifah.

Sistem despotisme akan dipublikasikan oleh Muawiyah ini diadopsi atas

adat- istiadat Bizantium serta Persia serta setelah itu diteruskan oleh para khalifah

selanjutnya. Menaiknya Yazid jadi penguasa men catat runtuhnya prinsip

kerakyatan Islam, sebab pengpointannya tidak lewat penentuan akan memantulkan sistem permusyawaratan, melainkan sebab penunjukan oleh bapaknya bersumber atas garis generasi.

5. Penentuan oleh ahl al- halli wa al-‘ aqd

Ahl al- halli wa al-‘ aqd mempunyai wewenang buat memilah khalifah ataupun atasan bersumber atas perjanjian di selah mereka. Mereka berperan semacam badan perwakilan orang akan bekerja melindungi faedah pemeluk.

6. Penentuan langsung oleh rakyat

Sehabis wafatnya Rasulullah, terjalin kehampaan kepemimpinan intens pemeluk Islam. Berita wafatnya Rasulullah membuat pemeluk Islam terkumpul di Saqifah Anak cucu Sa’ idah buat mangulas siapa akan hendak jadi penerus dia. Atas dikala itu Abu Bakar mengantarkan ceramah akan memastikan kalangan Ansar serta Muhajirin mengenai berartinya aliansi serta perlunya seseorang atasan akan kokoh dan profesional. Dia menegaskan pemeluk Islam kalau kaum Quraisy yakni kaum akan sangat

pantas buat mengetuai pemeluk Islam. Sokongan juga lalu tiba atas para kawan apalagi Umar meluruskan tangannya atas Abu Bakar serta membaiatnya selaku khalifah. Insiden di Saqifah itu jadi insiden akan men catat lahirnya penaikan atasan akan diseleksi atas cara demokratis bersumber atas perjanjian pemeluk.

7. Penentuan oleh regu formatir atau badan musyawarah

Rancangan syura ini jadi bawah buat team formatir ataupun badan konferensi. Intens Islam, syura yakni prinsip diskusi dan

pengumpulan ketetapan beramai- ramai, akan dikira selaku wujud sempurna intens memilah atasan. Perihal ini didasarkan atas sebuatan buatan al- Qur'an akan menekankan berartinya konferensi, semacam intens pesan Asy- Syura buatan 38:

" Serta(buat) banyak orang akan menyambut(menaati) jeritan Tuhan serta mendirikan shalat, lagi hal mereka(diputuskan) atas

konferensi selah mereka, serta mereka menginfakkan beberapa atas keuntungan akan Kita buatkan atas mereka".

Buatan itu menarpoinn kalau berartinya konferensi intens

menuntaskan sesuatu hal tercantum intens penentuan kepala negeri.

8. Tata cara revolusi ataupun kudeta

Tata cara berikutnya ialah tata cara revolusi ataupun kudeta akan dicoba lewat antagonisme Muawiyah keatas Ali, akan diawali kala Ali dibai' at jadi khalifah mengambil alih Utsman bin Affan. .[1]

Intens kondisi Islam penentuan atasan atas tata cara revolusi ataupun kudeta tidak atas cara langsung dianjurkan, karena perihal ini yakni sesuatu wujud makar. .[2]

Penentuan kepala negeri intens Islam tidak menjajaki bentuk penentuan biasa modern, namun lewat metode bai' at akan didahului atas konferensi oleh ahlulḥalli wal‘ aqdi, ialah banyak orang berpendidikan serta memefeki akan mempunyai kompetensi intens memastikan siapa akan pantas mengetuai pemeluk. Pemimpin Al- Mawardi melaporkan“ Bila seseorang pemimpin sudah meninggal, hingga penunjukan pemimpin setelahnya ialah peranan pemeluk lewat ahlul halli wal‘ aqdi. Mereka akan memilah serta membuatkan bai' at atas calon pemimpin akan penuhi ketentuan". . [3]

Ibn Taymiyyah pula melaporkan kalau kewenangan intens Islam tidak legal melainkan atas perjanjian(ijma') pemeluk ataupun keterwakilan mereka.[4]

---

[1] Syafik Ubaidila, Binti Maunah, "Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam, *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial"*, Vol. 6, No. 1, (2022), 164.

[2] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah*..., 7.

[3] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah*..., 7.

[4] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah*..., 7.

" Imamah ditegakkan atas bawah faedah pemeluk, serta tidak legal melainkan atas perjanjian pemeluk ataupun perwakilan mereka(ahlulḥalli wal' aqdi)".

Lebih lanjut intens perspektif siyasah syar' iyah, penentuan kepala negeri(pemimpin ataupun khalifah) ialah buatan berarti intens melindungi aturan rezim Islam akan berlandasan atas syariat. Metode ini berasal atas aplikasi akan terjalin semenjak era Khulafaur Rasyidin serta dibesarkan oleh para malim klasik semacam Al- Mawardi, Ibn Taymiyyah, serta akan lain. Selanjutnya ini yakni metode penentuan kepala negeri buat siyasah syar' iyah..[5]

1. Ahlul Halli Wal-Aqdi

Pengertian *ahlul halli wal aq'di* secara bahasa yakni orang-orang akan mempunyai wewenang buat melonggarkan dan mengikat (*ahlu* yakni orang akan berhak akan memiliki, *hallu* yakni melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* yakni mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Tugasnya selah lain, memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.[6]

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama atas berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan akan dapat mengesahkan pengpointan kepala negara.

[5] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah*..., 5.

[6] Nur Kholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pengpointan itu hanya sah atas keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* atas seluruh negeri tanpa membatasi atas jumlah tertentu. Ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa akan harus hadir buat mengesahkan pengpointan khalifah yakni seluruh anggota *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Hal ini agar seluruhnya ridho atas pengpointan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.[7] Ulama syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengpointan khalifah tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota ahlul halli wal aqdi atas seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.[8]

Sebuatan ulama berpendapat bahwa jumlah minimal akan dapat mengesahkan pengpointan khalifah yakni lima orang akan sepakat buat mengpoint seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal. Pertama baiat Abu bakar dilakukan oleh lima orang akan sepakat buat mengpointnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang akan lainnya. Mereka yakni, Umar ibnu Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrair, Basyar bin Saad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. Kedua, Umar r.a menjadikan syura, akan terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang atas mereka dipoint sebagai pemimpin

[7] Abu yala al-Farra, *Al- Ahkam Shultaniyyah*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Fikr, 1994), 7.
[8] Imam al- Mawardi, *AL-Ahkam al-Shultaniyyah*..., 6.

negara atas persetujuan lima orang sisanya. Ini yakni pendapat mayoritas fuqoha dan mutakallimin atas penduduk basrah.[9]

Adapun kelompok akan lain, atas ulama kuffah, berpendapat bahwa pengpointan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan atas persetujuan dua orang sehinnga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Kelompok akan lain berkata bahwa dapat dilakukan atas satu orang karena Abbas berkata keatas Ali r.a., bentpoinnlah tanganmu buat aku baiat kamu. Maka orang orang berkata, paman Rasulullah SAW telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang akan dapat menentangnya karna hal itu yakni hukum, dan hukum satu orang dapat sah.[10]

Al- Mawardi menyebut *Ahlul Halli Wal Aq'di* harus memenuhi tiga syarat selah lain:[11]

a. Keadilan akan memenuhi segala persyaratannya.
b. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.
c. Memiliki kecerdasan dan kearifan akan menyebabkan dia mampu memilih imam akan paling maslahat serta paling mampu tentang kebijakan-kebijakan akan mampu membawa kemaslahatan buat ummat.

2. Penyerahan Mandat atas Kepala Negara Sebelumnya

[9] Imam al- Mawardi, *Al-Ahkam al-Shultaniyyah*..., 8.
[10] Imam al- Mawardi, *AL-Ahkam al-Shultaniyyah*..., 9.
[11] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash Sulthaniyyah...,* 35.

Buat Al- Mawardi penaikan kepala negeri bersumber atas penyerahan amanat atas kepala negeri lebih dahulu bisa dicoba serta sudah disetujui legalitasnya. Perihal ini bersumber atas 2 insiden akan sempat dicoba kalangan muslimin, serta mereka tidak memungkirinya. Awal, Abu Bakar menunjuk Umar bin khattab selaku khalifah penggantinya, setelah itu kalangan muslimin menyambut kepemimpinan Umar bin Khattab bersumber atas penunjukan Abu Bakar itu. Kedua, Umar bin Khattab memercayakan kepemimpinan sepeninggalannya atas badan asyura. Badan badan syura akan notabene yakni tokoh- tokoh priode kala itu menyambut mandat kepemimpinan ini sebab beriktikad keabsahannya. Beberapa kawan tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan atas Abbas bin Abdul Muthalib akan mengecamnya atas keterlibatannya intens badan syura, ini yakni salah satu atas demikian banyak perkara Islam akan agung.

1. Persetujuan Ummat

Pemimpin Ahmad intens memaknakan perkataan nabi“ benda siapa mati intens kondisi beliau tidak memilki atasan hingga beliau mati atas kematian jahiliyah” berkata,“ mengerti kah kalian apa itu atasan? Ia yakni kalangan muslimin menyetujuinya serta seluruhnya mengatakan, ini yakni atasan, ini yakni arti atas penafsiran akan diartikan. Ibnu Taimiyah, menakankut pembaiatan Abu Bakar berkata kalau seandainya durasi itu Umar bin Khattab serta segerombol orang membaiat Abu Bakar tetapi para kawan akan lain tidak mau buat membaiat Abu Bakar tidak hendak dapat jadi pemimpin karenanya. Hendak namun, durasi itu Abu Bakar dapat jadi pemimpin bersumber atas

pembaiatan jumhur kawan akan nyaman mereka yakni banyak orang akan mempunyai keahlian kewenangan serta efek.

2. Lewat Daya(al- Taghallub)

Bila seseorang atasan mengutip kewenangan atas daya ataupun kudeta, namun setelahnya beliau melemppoinn kesamarataan serta mempraktikkan syariat, hingga pemerintahannya dapat dikira legal. Ini lebih atas kondisi gawat, bukan sempurna.“ Bila seseorang atasan sukses memahami kewenangan serta orang point tangan atasnya, hingga imamah- nya legal buat melindungi kemantapan pemeluk”.

3. Lewat Penentuan Umum

Intens kondisi kontemporer, sebuatan malim beranggapan kalau pemilu bisa jadi buatan atas ijtihad modern selaku wujud aktualisasi syura, atas memo prosesnya seimbang serta cocok prinsip syar’ i.“ Pemilu yakni ijtihad kontemporer intens mempraktikkan prinsip syura atas cara besar di tengah warga modern”.

Bisa disimpulkan kalau intens Islam, Metode penentuan kepala negeri buat siyasah syar’ iyah bisa ditempuh lewat:

1. Baiat oleh ahl al- hall wa al-‘ aqd(penting)

2. Penyerahan amanat atas kepala negeri sebelumnya

3. Persetujuan umat

4. Pemilik alihan kewenangan akan berakhir atas kemantapan serta kesamarataan(al- taghallub)

5. Penentuan biasa selaku wujud syura modern.

Tiap tata cara mempunyai legalitas atas ketentuan kepala negeri penuhi syarat- syarat syar' i, semacam seimbang, berpendidikan, sanggup melaksanakan hukum syariat, serta melindungi faedah umat.

B. Mekanisme dan Penetapan Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Dilihat Atas Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Penentuan Abdurrahman Satu selaku Kepala negara Republik Indonesia oleh Badan Permusyawaratan Orang(MPR) atas konferensi biasa 20 Oktober 1999 ialah buatan atas penerapan independensi orang lewat perwakilan begitu juga diatur intens Hukum Bawah 1945 saat sebelum amandemen. Dikala itu, MPR yakni badan paling tinggi negeri akan menggenggam independensi orang serta berhak mengangkut serta memberhentikan Kepala negara serta Delegasi Kepala negara.

1. Kerpoin Balik Penetapan

Penentuan Abdurrahman Satu selaku Kepala negara Republik Indonesia ke- 4 berjalan intens atmosfer peralihan pasca- reformasi, mengambil alih Kepala negara B. J. Habibie. Penentuan ini dicoba lewat metode konstitusional oleh Badan Permusyawaratan Orang(MPR) atas konferensi biasa MPR tahun 1999. Buat konstitusi akan legal dikala itu, ialah UUD 1945 saat sebelum amandemen, kepala negara diseleksi oleh MPR, bukan lewat penentuan langsung oleh orang.

Romli melaporkan kalau intens sistem ketatanegaraan UUD 1945 saat sebelum amandemen, kepala negara diseleksi bukan atas cara langsung oleh orang, melainkan oleh badan MPR selaku representasi suara orang. Oleh sebab itu, walaupun PDIP mendapatkan suara paling banyak intens Pemilu

1999, perihal itu tidak atas cara otomatis menghasilkan Megawati selaku Kepala negara. Penentuan kepala negara senantiasa wajib dicoba intens forum konferensi biasa MPR.

MPR RI dikala itu melaksanakan wewenangnya atas cara legal cocok Artikel 6 serta Artikel 3 UUD 1945(pra- amandemen), ialah memilah kepala negara atas calon- calon akan diajukan oleh fraksi- fraksi. Gus Dur kesimpulannya diseleksi oleh kebanyakan suara intens MPR sehabis terjadinya aliansi Poros Tengah, akan atas cara konstitusional legal intens sistem perwakilan MPR.

Buat Azyumardi Azra penentuan Gus Dur pula memantulkan metode demokratis intens kerpoin konstitusi akan legal dikala itu, ialah penentuan oleh MPR, bukan penentuan langsung oleh orang begitu juga diatur intens UUD 1945 pasca- amandemen. Oleh sebab itu, penentuan Gus Dur tidak berlawanan atas hukum, melainkan memantulkan aplikasi kerakyatan representatif begitu juga didesain oleh UUD 1945 atas era itu.

2. Cara Penentuan di Konferensi Biasa MPR 1999

Sehabis pemilu legislatif 1999, Partai Kerakyatan Indonesia Peperangan(PDIP) mencapai suara paling banyak serta mengpoint Megawati Soekarnoputri selaku calon kepala negara. Tetapi intens penentuan kepala negara di MPR, Abdurrahman Satu(Gus Dur), calon atas Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), sukses mendapatkan sokongan atas aliansi poros tengah, akan terdiri atas PPP, PAN, Golkar, serta partai- partai Islam akan lain. Gus Dur berhasil atas Megawati lewat pemungutan suara

intens Konferensi Biasa MPR bertepatan atas 20 Oktober 1999, atas akuisisi 373 suara berbanding 313 suara. Aliansi Poros Tengah akan terdiri atas partai- partai Islam jadi determinan kemenangan Gus Dur intens penentuan kepala negara di MPR 1999.

3. Analisa Siyasah Syar' iyah keatas Penentuan Gus Dur

Intens perspektif siyasah syar' iyah, penentuan kepala negeri wajib penuhi ketentuan legalitas(al- masyru' iyyah) serta faedah biasa(al-mashlahah al-' ammah). Pemimpin Al- Mawardi mengatakan kalau penaikan kepala negeri bisa dicoba oleh ahl al- halli wa al-' aqd, ialah badan jago akan berhak membuatkan legalitas kepemimpinan. Penentuan Gus Dur oleh MPR bisa dikategorikan selaku aplikasi modern atas rancangan ahl al-halli wa al-' aqd, sebab MPR dikala itu ialah representasi orang serta wilayah akan atas cara de jure mempunyai daulat konstitusional. Imamah cuma legal bila dicoba oleh ahl al- halli wa al-' aqd, ialah banyak orang akan mempunyai wewenang, ilmu, serta integritas buat memilah atasan pemeluk.

Intens siyasah syar' iyah, metode penentuan atasan wajib mencermati ketentuan: seimbang, berpendidikan, sanggup melaksanakan kewajiban kepemimpinan, serta mendapatkan legalitas khalayak.

Penentuan Abdurrahman Satu selaku kepala negara lewat MPR ialah cara akan legal atas cara konstitusional serta cocok prinsip siyasah syar' iyah sebab:

a. Dicoba oleh badan representatif(MPR) akan berfungsi selaku ahl al-halli wa al-' aqd.

b. Gus Dur penuhi ketentuan kepemimpinan semacam intelektualitas, adab, serta integritas.

c. Diputuskan lewat konferensi serta pemungutan suara intens antusias kerakyatan serta faedah bangsa.

Disisi lain banyak akan tidak berpikir kalau Gus Dur tersaring jadi kepala negara. Perihal ini disebabkan situasi raga Gus Dur kala itu telah lelah. Apalagi banyak pula akan membimbpoinn Gus Dur dapat melaksanakan tugasnya selaku kepala negara atas cara wajar. Beliau hadapi cacat raga berbentuk kebutaan atas mata kiri serta beberapa atas mata kanan. Pandangannya mulai memburuk sebab glaukoma semenjak tahun 1985, serta diperparah oleh suatu musibah di mana beliau terbentur mobil akan menyebabkan lenyapnya retina.

Atas dikala pelantikannya selaku kepala negara, beliau dibantu oleh seseorang opsir Pointan Bumi akan berperan selaku asisten atas membaca balik bacaan ikrar kepala negara.

Al- Mawardi melaporkan kalau salah satu ketentuan jadi atasan yakni pancaindranya komplit serta segar atas pandengaran, pandangan, lidah, serta serupanya alhasil beliau bisa membekuk atas betul serta pas apa akan dibekuk oleh indranya itu.

Walaupun ketentuan jadi atasan negeri wajib segar raga serta panca inderanya, Gus Dur jadi dispensasi. Gus Dur senantiasa dinaikan jadi kepala negara walaupun situasi fisiknya tidak seluruhnya segar. Beliau yakni

kepala negara indonesia awal serta sampai dikala ini salah satunya akan mempunyai cacat raga.

Alibi kenapa Gus Dur senantiasa dinaikan jadi Kepala negara Republik Indonesia atas tahun 1999 walaupun beliau hadapi cacat raga(kendala pandangan) tidak sekedar didasarkan atas situasi fisiknya, namun lebih atas aspek politik, intelektual, legalitas akhlak, serta sokongan aliansi partai politik dikala itu. Selanjutnya uraiannya bersumber atas hasil amatan objektif serta historis:

a. Sokongan Politik akan Kuat

Gus Dur diusung oleh aliansi Poros Tengah, ialah federasi partai- partai Islam semacam PAN, PPP, PKB, serta PBB, akan menakankal kekuasaan PDI- P walaupun PDI- P berhasil intens Pemilu 1999. Poros Tengah membina kekokohannya serta atas cara politik mensupport Abdurrahman Satu selaku pengganti atas Megawati.

b. Nama baik Intelektual serta Moral

Gus Dur diketahui selaku figur pluralis, demokrat, serta intelektual Islam akan disegani, bagus nasional ataupun global. Walaupun mempunyai keterbatasan raga, pandangan serta wawasannya amat besar. Keterbatasan pandangan tidak kurangi daya intelektual serta kapasitas kepemimpinannya.

c. Ikon Perdamaian serta Demokrasi

Pemilihannya memantulkan impian hendak perdamaian nasional sesudah kekacauan 1998 serta pergantian besar intens politik Indonesia. Gus Dur dikira sanggup menjembatani golongan Islam, patriot, serta minoritas.

d. Konstitusi tidak mencegah penyandang disabilitas

UUD 1945 ataupun peraturan dikala itu tidak mempersyaratkan situasi raga khusus buat jadi kepala negara, sepanjang calon mempunyai kapasitas psikologis serta sanggup melaksanakan tugasnya. Tidak terdapat satu juga artikel intens UUD akan mencegah penyandang disabilitas raga buat jadi kepala negeri.

e. Konsensus politik MPR

MPR selaku badan paling tinggi negeri durasi itu memilah Gus Dur lewat metode pemungutan suara, serta beliau menaklukkan Megawati intens Konferensi Biasa MPR 20 Oktober 1999.

Bisa disimpulkan kalau Gus Dur hadapi situasi kesehatan akan tidak seluruhnya prima atas dikala pemilihannya, hendak namun perihal itu tidak jadi penghalang penting buat Badan Permusyawaratan Orang(MPR) buat mengpointnya selaku Kepala negara Republik Indonesia. Penaikan Gus Dur lebih didasarkan atas keyakinan keatas kapasitas intelektual, integritas akhlak, dan komitmennya keatas poin- poin kerakyatan serta pluralisme. Tidak hanya itu, sokongan politik atas bermacam buatan, tercantum atas partai- partai reformis serta Islam berimbang, ikut menguatkan legalitas politiknya. Gus Dur ditatap selaku wujud pemersatu akan sanggup bawa bangsa Indonesia pergi atas darurat multidimensional pasca- reformasi, alhasil estimasi politik serta sosial lebih diprioritaskan atas situasi fisiknya semata.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bersumber atas sebuatan penjelasan akan sudah dipaparkan atas penyusunan skripsi ini, hingga bisa didapat sebuatan kesimpulan selaku selanjutnya:

1. Penentuan Abdurrahman Satu selaku Kepala negara Republik Indonesia ke- 4 dicoba lewat metode konstitusional oleh Badan Permusyawaratan Orang(MPR) atas konferensi biasa MPR tahun 1999. Buat konstitusi akan legal dikala itu, ialah UUD 1945 saat sebelum amandemen, kepala negara diseleksi oleh MPR, bukan lewat penentuan langsung oleh rakyat
2. Metode penentuan kepala negeri buat siyasah syar' iyah bisa ditempuh lewat 5 metode ialah, baiat oleh ahl al- hall wa al-' aqd(penting), penyerahan amanat atas kepala negeri lebih dahulu, persetujuan pemeluk, pemilik alihan kewenangan akan berakhir atas kemantapan serta kesamarataan(al- taghallub), serta penentuan biasa selaku wujud syura modern. Penentuan Gus Dur oleh MPR bisa dikategorikan selaku aplikasi modern atas rancangan ahl al- halli wa al-' aqd, sebab MPR dikala itu ialah representasi orang serta wilayah akan atas cara de jure mempunyai daulat konstitusional. Atas dikala diresmikan selaku kepala negara, Gus Dur intens situasi hadapi cacat raga(kendala pandangan), tetapi perihal itu tidak jadi penghalang buat terpilihnya Gus Dur selaku kepala negeri. Ini disebabkan sebuatan aspek politik, intelektual, legalitas akhlak, serta sokongan aliansi partai politik dikala itu.

B. Saran

Sehabis menguasai kesimpulan, hingga periset bisa membuatkan saran-saran selah lain:

1. Buat pemeluk Islam serta akademisi, butuh lalu menelaah aplikasi prinsip siyasah syar' iyah intens kondisi kenegaraan modern, supaya bisa membuatkan partisipasi jelas keatas sistem kerakyatan akan berkeadilan serta arti.
2. Penguasa serta badan legislatif seharusnya mencermati poin- poin akhlak serta keimanan intens cara penentuan ataupun penentuan atasan bangsa, tidak sekedar bersumber atas daya politik ataupun kebutuhan efisien.
3. Buat riset berikutnya, dianjurkan melaksanakan riset komparatif selah bermacam bentuk penentuan kepala negeri intens asal usul Islam serta aplikasi politik modern di bermacam negeri mukmin, supaya didapat cerminan akan lebih besar mengenai siyasah syar' iyah intens aturan rezim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Munawar, Ijtihad Politik Gus Dur Analisa Artikel Kritis, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Al- Brebesy, Ma' mun Murod, Menyingkapkan Pandangan Politik Gus Dur serta Amien Rais mengenai Negeri, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Al- Farra, Abu yala, Al- Ahkam Shultaniyyah, Beirut: Dar al- Poros al- Fikr, 1994.

Al- Jauziyah, Ibnul Qayyim, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syariyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Matbaah Dar Al Bahana, 2005.

Al- Maududi, Abu A' la, Islamic Law and Constitution, Pakistan: Islamic Publications, 1960.

Al- Mawardi, Al- Ahkam As- Sulṭaniyyah, Wa Al Area Ad- Diniyyah, Beirut: Dar al- kutub, 1996.

Al- Mawardi, Al- Ahkam As- Sulṭaniyyah, Wa Al Area Ad- Diniyyah, terj. Abdul Hayyi Al- Kattani serta Kamaludin Nurdin, Jakarta: Dengung Insani Press, 2000.

Al- Qardhawi, Yusuf, Min Fiqh ad- Daulah fil Islam, terj. Kathur Suhardi Fiqih Daulah intens Perspektif al Qur‟an serta Sunnah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

al- Sadr, Sayyid Muhammad Baqir, Pemimpin Ali: Kesamarataan Ilahi, Teheran: Islamic Propagation Organization, 1990.

Al- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Politik Islam; Ta' liq Siyasah Syar' iyah Ibnu taimiyah, Jakarta: Graha Ilmu, 2009.

Al- Zuhayli, Wahbah, Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al- Fikr, 2007.

Al- Zuhayli, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Dengung Insani, 2011.

Anwar, Rosihan, Pandangan Politik Islam: atas Khulafaur Rasyidin sampai Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Aprianto, Epran, Kedudukan Abdurrahman Satu intens Politik di Indonesia(1991-2001), Harian Intelektualita: Keislaman, Sosial serta Ilmu, Vol. 5, Nomor. 2, 2016, 132.

Arba, Syarofin, Demitologisasi Politik Indonesia, Mengpoint Elitisme intens Sistem Terkini, Jakarta: CIDES, 1998.

As Hikam, Muhammad, Kerakyatan serta Civil Society: Jawaban Gus Dur keatas Isu- isu Politik Kontemporer, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999.

Ash- Shallabi, Ali Muhammad, Memoar Umar bin Khattab, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2012.

Aspinall, Edward, Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia, California: Stanford University Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Aturan Negeri Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Atmasasmita, Romli, Pembaruan Politik serta Hukum di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Azhary, Tahir, Negeri Hukum: Sesuatu Riset mengenai Prinsip- prinsip Diamati atas bidang Hukum Islam, Implementasinya atas Rentang waktu Negeri Madinah serta Era Saat ini, Jakarta: Prenada Alat, 2003.

Azra, Azyumardi, Kerakyatan serta Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Prenada Alat, 2001.

Azra, Azyumardi, Islam Kata benda: Supaya Pemeluk Tidak Jadi Busa, Bandung: Libra, 2000.

Bakri, Syamsul & Mudhofir, Jombang Kairo, Jombang Chicago(Campuran Pandangan Gus Dur serta Cak Nur intens Pembaruan Islam di Indonesia), Solo: 3 Gugusan, 2004.

Barton, Greg, Memoar Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Satu, terj. Lie Hua, Yogyakarta: LKiS, 2017.

Baso, Ahmad, Parodi Lokalitas, Jakarta: Disselah, 2002.

Dahlan, Meter, Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.

Djazuli, A, Fiqih siyasah(Impelementasi Faedah Pemeluk intens Rambu- rambu syar' iyah, Bandung: Prenada Alat, 2003.

Djazuli, A, Kaidah- Kaidah Fikih Kaidah- Kaidah Hukum Islam Menuntaskan Permasalahan Efisien, Jakarta: Emas, 2011.

Effendy, Bahtiar, Islam and the State in Indonesia, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Esposito, John Louis & Jhon Obert Voll, Islam and Democracy, New York: Oxford University Press, 1996.

Fairus, Rifqi, Peringatan Haul Gusdur di Yogyakarta, https: atau atau islami. co atau peringatan- haul- gus- dur- di- yogyakarta- ibu- sinta- nuriyah- ungkap- sosok- gus- dur- sebagai- budayawan atau, diakses atas 02 Juni 2025.

Faisal, Ismail, Islamic Triadisionalism in Indonesia: a Study of the Nahdlatul Malim‘ s Early History and Religious Ideology, Yogyakarta: LESFI, 2004.

Gunawan, Ajaran., A. Muin Fahmal & Nurul Qamar, Analisa keatas Penentuan Khalifah Intens Negeri Khilafah Intens Perspektif Asal usul Hukum, Journal of Lex Generalis, Vol. 2, Nomor. 2, 2021, 906.

Hairus Salim, Gus Dur Si Kosmopolit,(Yogyakarta: Novel Mojok Tim, 2020), 29.

Harahap, Solehuddin, Siyasah Syar’ iyah intens Perspektif Islam, Harian Hukumah: Harian Hukum Islam, Vol. 5, Nomor. 2, 2022, 113.

http: atau atau id. wikipedia. org atau wiki atau Gus_dur, diakses atas 24 Mei 2025

https: atau atau id. meter. wikipedia. org atau wiki atau Abdurrahman_Wahid, diakses 03 Maret 2025.

https: atau atau nasional. kompas. com atau dramapanjangusdur, diakses 20 Mei 2025.

Hutari, Fandy, Gus Dur selaku Cendikiawan, https: atau atau www. gugus kalimat. id atau nasional atau gus- dur- sebagai- budayawan- dan- penyuka- dangdut, diakses atas 02 Juni 2025.

Ibad, Muhamad Nurul serta Akhmad Fikri, Ayah Tionghoa Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2012.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Ajaran Politik Islam, Jakarta: Style Alat Pratama, 2007.

Islamy, Athoillah, Alas Filosofis serta Corak Pendekatan Abdurrahman Satu mengenai Aplikasi Hukum Islam di Indonesia, Al- Yakni: Harian Hukum serta Politik Islam, Vol. 6, Nomor. 1, 2021, 51.

Isra, Saldi, Perpindahan Guna Legislasi: Menguatnya Bentuk Legislasi Parlementer intens Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Junaedi, Jejak Antropologis Pandangan serta Aksi Gusdur, Bandung: PT Anak muda Rosda Buatan, 2000.

Emas, Inu et al, Sistem Politik Indonesia, Bandung: Refika Aditama 2006.

Liddle, R. William, Indonesia’ s Democratic Transition: Playing by the Rules?, Pacific Affairs, Vol. 73, Nomor. 1, 2000, 373- 399.

Liddle, R. William, Leadership and Culture in Indonesian Politics, Jakarta: Equinox, 2005.

Majid, Nur Kholis, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Ajaran Politik Islam, Jakarta: Style Alat Pratama, 2001.

Manan, Abdul, Politik Hukum Riset Analogi Intens Aplikasi Ketatanegaraan Islam, Jakarta: Emas, 2016.

Manning, Chriss serta Peter Van Diermen, Indonesia di Tengah Peralihan: Sedi-segi Sosial atas Pembaruan serta Darurat, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Maulida, Meter, Rancangan Hak Asas Orang Buat Abdurrahman Satu, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negara Sumatera Utara, 2018.

Moleong, Lexy J, Metodologi Riset Kualitatif Versi Perbaikan, Bandung: Anak muda Rosdakarya, 2007.

Mukhtarom, Asrori & Priyo Susilo, Negeri Intens Kajian Al- Qur' an, Harian Amatan Islam, Vol. 1, Nomor. 1, 2019, 14.

Nasir, Muhammad, Sistem Penentuan Kepala Negeri intens Anggapan Al- Mawardi serta Ibn Taimiyah(Amatan keatas Sistem Penentuan Kepala negara Republik Indonesia, Doctoral Dissertation, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2016, 10.

Nasution, Taufiq Alhadi & Abdullah, Penentuan Kepala Wilayah Lewat Pemungutan Suara Balik intens Perspektif Fikih Siyasah, Harian Hukum Aturan Negeri serta Siyasah, Vol. 1, Nomor. 2, 2022, 164.

Nata, Abuddin. Tokoh- tokoh Pembaruan Pembelajaran Islam di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2005.

Nurcholish, Ahmad, Peace Education serta Pembelajaran Perdamaian Gus Dur, Jakarta: PT Elex Alat Komputindo, 2015.

Nurhuda, Ahmad serta Yera Zettira A, Era Rezim Abdurrahman Satu(1999- 2001), Tarikhuna: Journal of History and History Education, Vol. 3, Nomor. 1, 2021, 113.

Pahlevi, Hafizh Syah Reza & Nasihun Amin, Pembelajaran Gairah Kerakyatan intens Insiden Suksesi di Saqifah Anak cucu Saidah serta Pancaroba Kepemimpinan Khulafa' ArRassyidin, Harian Pembelajaran Agama Islam, Vol. 6, Nomor. 2, 2021, 94.

Pamungkas, Maskawin Tri dkk, Abdurrahman Satu: Study Pandangan Mengenai Kedekatan Agama serta Negeri, Harian Candi, Vol. 14, Nomor. 2, 2016, 20.

Ridwan, Fiqh Politik Buah pikiran Impian Serta Realitas, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rifai, Muhammad, Gus Dur, KH Abdurrahman Satu Memoar Pendek 1940- 2009, Yogyakarta: Garasi, 2020.

Rustina, Yastri, Kebijaksanaan Politik Gus Dur selaku Kepala negara RI ke- 4 keatas Referendum Aceh, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Sachedina, Abdul teragung A, Kepemimpinan intens Islam Perspektif Syi' ah, Bandel: Libra, 1991.

Santalia, Blaster, K. H. Abdurrahman Satu: Agama serta Negeri, Pluralisme, Pendemokrasian serta Pribumisasi, Harian Al Adyaan: Harian Sosial serta Agama, Vol. 1, Nomor. 2, 2015, 137.

Setiawan, Andi, Kedudukan MPR intens Penentuan Kepala negara saat sebelum serta setelah Amandemen UUD 1945, Harian Konstitusi, Vol. 5 Nomor. 3, 2008, 112.

Shidiq, Rohani, Gus Dur Pelopor Dinamisasi Pengajar Madrasah Memperteguh Poin- poin Madrasah buat Alih bentuk serta Kosmopolitanisme Islam Nusselah, Yogyakarta: Kastel Publishing, 2015.

Sidiq, Mahfudz, KAMMI serta Pergulatan Pembaruan, Solo: Masa Intermedia, 2003.

Sihbudi, Riza et al, Kobaran Intens Sekam: Pengenalan hendak Permasalahan serta Pemecahan atas Konflik- Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, serta Riau, Bandung: Libra, 2001.

Sulistio, Eko., Agus Purnomo & Dede Alat Loyal budi, Analisa Asal usul Peradaban Islam Era Khulafaurrasyidin, Harian Amatan Agama serta Multikulturalisme Indonesia, Vol. 2, Nomor. 1, 2023, 2.

Suseno, Frans Magnis, Pembawa Bangsa Sesudah Konvensional, intens INCRES, Beyond

The Symbols Jejak antropologis Pandangan serta Aksi Gusdur, Bandung; Anak muda Rosda Buatan, 2000.

Taimiyah, Ibnu, As Siyâsah as Syariyah fi islâhir râi war raiyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.

Taimiyah, Ibnu, Siyasah Syar' iyyah: Politik Islam Buat Ibnu Taimiyah(terj. Abu Umar Basyir), Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001.

Taimiyyah, Ibnu, Majmu al- fatawa, A. Al Jazzar & A. al- Baz, eds, Kairo: Dar al-Wafa, 2004.

Thoha, Miftah, Birokrasi Penguasa Indonesia di masa pembaruan, Jakarta: Prenada Alat, 2011.

Ubaidila, Syafik & Binti Maunah, Rancangan Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam, Harian Agama serta Pergantian Sosial, Vol. 6, Nomor. 1, 2022, 164.

Umar, Nasaruddin, Merto TV, Khazana Islam, 18 Maret 2018.

Satu, Abdurrahman, Pergulatan Negeri, Agama, serta Kultur, Jakarta: Desselah, 2001.

Yusalia, Henny, Malim serta Politik Kajian Kedudukan Abdurrahman Satu intens Perpolitikan Indonesia, Wardah, Nomor. 22, 2011, 23.

Zastrow, Gus Dur, Siapa sih sampeyan?, Jakarta: PT Gairah Aksara Pratama, 1999.

Zulkarnaen, Iskandar et al, Novel Politik Aplikasi Siyasah Syar' iyah Aceh, Aceh: Bos Publishing, 2021.